

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG ETIKA KAMPANYE POLITIK
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI LAMPUNG BARAT**

(Studi pada KPUD Kabupaten Lampung Barat)



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh
HARIS WANTO
NPM : 1321020049

Jurusan : Siyasa

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1441 H / 2019 M

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG ETIKA KAMPANYE POLITIK
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI LAMPUNG BARAT**

(Studi pada KPUD Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh

**HARIS WANTO
NPM : 1321020049**

Jurusan : SiyasaH

Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Kampanye pemilihan adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Kampanye Politik merupakan gerakan serempak untuk menarik simpatisan dari khalayak secara universal. Namun dalam konteks ini sering terjadinya banyak penyelewengan yang dilakukan oleh para elit-elit politik yang berusaha ingin mendapatkan sebuah keuntungan dari diselenggarakannya kampanye tersebut. Kebiasaan buruk tersebut sudah menjadi seperti tradisi dalam kampanye, baik terkait dengan ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun etika dalam berkampanye telah diatur dalam undang-undang pemilu serta syari'at Islam.

Penelitian ini difokuskan pada etika kampanye politik pada pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pandangan politik Islam terhadap etika kampanye politik pada pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui etika kampanye politik pada pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat menurut *Fiqh Siyasah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitiannya *deskriptif*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian hasilnya dianalisis secara *kualitatif*.

Hasil penelitian bahwa etika kampanye politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat menurut KPU setempat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2016. Tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik di mata masyarakat Lampung Barat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Visi dan misi kedua pasangan calon begitu gamlang untuk memajukan Kabupaten Lampung Barat serta kampanye-kampanye terbuka dan blusukan yang dilakukan tim kampanye kedua pasangan calon tidak berarti, karena adanya suatu penekanan dengan masyarakat khususnya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Desa serta isu-isu negatif menjadi catatan buruk bagi masyarakat. Meskipun cacatan buruk tersebut tidak sampai ke ranah Hukum karena sulitnya masyarakat untuk membuktikan kepada pihak yang berwenang.

Adapun pandangan Fiqh Siyasah terhadap etika kampanye politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat bertentangan dengan Syariat Islam seperti yang terkandung dalam surat Al-hujuraat ayat 12 menjelaskan tentang larangan berburuk sangka dan mencari keburukan orang lain, dosanya sama seperti memakan bangkai, dan memakan bangkai dalam Islam hukumnya haram.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara


Nama : Haris Wanto
NPM : 1321020049
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah tentang Etika Kampanye pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat (studi pada KPUD Kabupaten Lampung Barat)


MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001


Dr. Liky Baizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011004

Mengetahui

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)**


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG ETIKA KAMPANYE POLITIK PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI LAMPUNG BARAT** (Studi pada KPUD Kabupaten Lampung Barat), disusun oleh **Haris Wanto, NPM : 1321020049**, Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari Selasa, 29 Oktober 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag, M.H.** 

Sekretaris : **Rudi Santoso, S.H.I., M.H.** 

Penguji Utama : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.** 

Penguji Pendamping I : **Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.** 

Penguji Pendamping II : **Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.** 

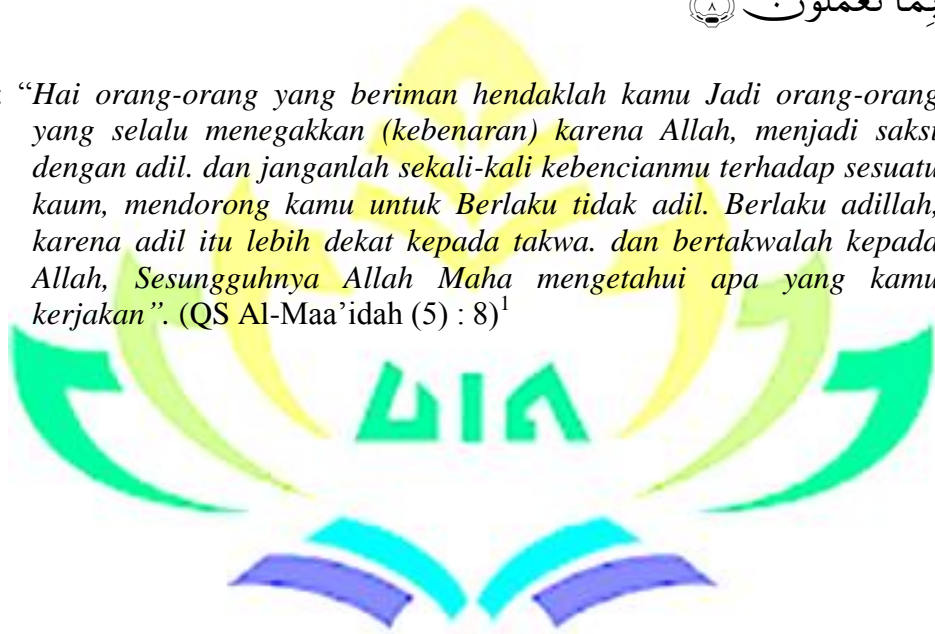


DEKAN,
Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Maa’idah (5) : 8)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), h. 128.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Lukman Apandi dan Ibunda Lila Marya yang telah mendidik membesarkanku memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku. Ridha Allah adalah keridhaanmu.
2. Adikku tersayang, Violeta Apriyanti yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangat yang begitu berharga kepada penulis.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Haris Wanto dilahirkan di Pekon Serungkuk, yaitu salah satu Desa yang ada di Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 07 April 1993, anak Pertama dari Dua Bersaudara dari pasangan Ayah yang bernama Lukman Apandi dan Ibu bernama Lila Marya. Penulis mengawali pendidikan pada :

1. Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Kenali Kecamatan Belalau Lampung Barat diselesaikan pada Tahun 2006.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Belalau Lampung Barat diselesaikan pada Tahun 2009.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012.
4. Tahun 2013 penulis baru melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

KATA PENGANTAR

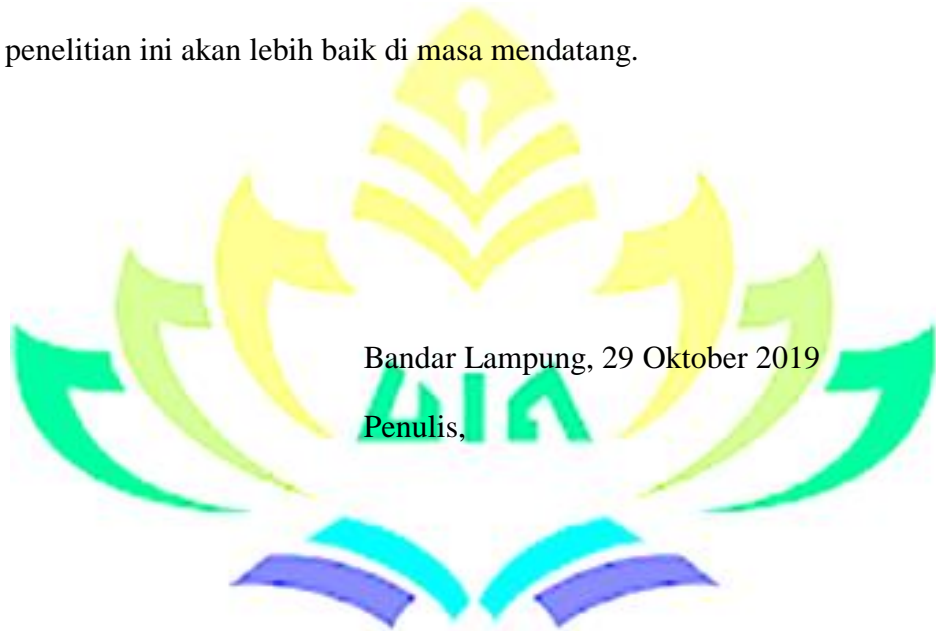
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Sang Maha Pencipta semesta alam yang telah memberikan nikmat pemahaman, kesehatan, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG ETIKA KAMPANYE POLITIK PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT, Studi pada KPU Kabupaten Lampung Barat” sebagai prasyarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi, dan fasilitas yang diberikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H., serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Bapak Frenki, M. Si.

4. Pembimbing I Bapak Dr. H. M. Wagianto, S.H., M.H., yang begitu sabar dan banyak meluangkan waktu serta memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Pembimbing II Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H., yang begitu sabar dan banyak meluangkan waktu serta memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Syariah.
7. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah membantu memberikan informasi, data, dan referensi.
8. Teruntuk sahabat kakak sekaligus saudaraku Rohman, S.E., Mariyon, S.H.I., Septian Dwi Saputra, S.H., Haikal Andrialis, Rendi Yusa Ambara, Muhammad Husen, Mufleh yang selama ini terus memberikan semangat serta bantuan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-teman keluarga besar Siyasah B atas cerita, doa, serta kebersamaannya selama ini dan insyaallah sampai seterusnya.
10. Untuk teman-teman KKN Fajar Mulya atas kerja sama dan pengalamannya, serta turut mendoakan dan membantu penulis dengan dukungan moril maupun materil.
11. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa penulis banggakan.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas. Tapi penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan kiranya dapat membantu penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini dan tak lupa penulis juga berharap para pembaca memberi masukan berupa saran sehingga penelitian ini akan lebih baik di masa mendatang.



Haris Wanto

NPM. 1321020049

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
G. Metode Penelitian.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Etika	
a. Pengertian Etika	18
b. Etika dalam Ilmu Politik	20
c. Etika dalam Kampanye Politik	24
d. Prinsip Dasar Etika Politik.....	29
2. Pandangan Fiqh Siyasah tentang Etika Politik	
a. Definisi Etika menurut Fiqh Siyasah	31
b. Dasar Hukum Etika menurut Fiqh Siyasah.....	35
c. Tujuan Etika Politik dalam Fiqh Siyasah.....	48
d. Ciri-ciri Etika Politik Islam.....	51
3. Konsep Pilkada Serentak	
a. Pengertian Pilkada Serentak.....	58
b. Fungsi Pemilu	61
c. Pemilihan Kepala Daerah.....	63
B. Tinjauan Pustaka	69

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Lampung Barat.....	71
2. Wilayah Administratif Lampung Barat.....	76
3. Letak Geografis Lampung Barat	77
4. Visi dan Misi Lampung Barat	79
B. Sosial Budaya Lampung Barat.....	80
C. Sarana dan Prasarana Lampung Barat.....	83

D. Perekonomian Lampung Barat.....	88
E. Pemerintahan Lampung Barat.....	89
F. Kampanye Politik Tahun 2017 di Lampung Barat.....	90

BAB IV ANALISIS DATA

A. Etika Kampanye Politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Lampung Barat.....	101
B. Pandangan Politik Islam tentang Etika Kampanye Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Lampung Barat.....	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai “**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG ETIKA KAMPANYE POLITIK PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI LAMPUNG BARAT**”, dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini.

Adapun beberapa istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut :

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.²
2. **Fiqh Siyasah** adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³
3. **Etika** adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan

² Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press, 1999), h.61.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h. 4.

buruk yang dilakukan oleh seseorang dan merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral.⁴

4. **Kampanye** adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.⁵
5. **Politik** secara singkat atau sederhana adalah teori, metode atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu.⁶
6. **Pilkada serentak** adalah proses pemilihan gubernur, bupati, serta walikota secara langsung oleh rakyat, yang dilakukan secara bersamaan bagi semua kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun yang sama.⁷
7. **Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)** adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁸

Berdasarkan penjelasan judul di atas, dapat disimpulkan maksud judul skripsi ini yaitu suatu penelitian mengenai Etika Kampanye dalam Politik menurut politik Islam.

⁴ Suhwardi K, Lubis, *Etika Propesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2000), h.2.

⁵ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 301.

⁶ *Ibid*, h. 608.

⁷ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pilkada-serentak/>, diakses 22-11-2017

⁸ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-komisi-pemilihan-umum/>, diakses 22-11-2017

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

- a. Pilkada adalah proses pemilihan kepala daerah atau pemimpin dalam suatu wilayah oleh masyarakat secara langsung yang seharusnya dipilih berdasarkan keinginan hati nurani masing-masing individu, namun dalam konteks ini masyarakat khususnya PNS sangat tertekan untuk memilih yang bukan dikehendakinya.
- b. Etika kampanye yang telah ditetapkan peraturannya baik dalam undang-undang KPU maupun etika politik Islam seharusnya menjadi pedoman bagi para elit politik atau para kandidat pasangan calon maupun tim sukses agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan semestinya dan tidak saling merugikan antara pejabat dengan masyarakat.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan judul skripsi ini, permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, serta di samping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

C. Latar Belakang Masalah

Pilkada serentak adalah proses Pemilihan Kepada Daerah (baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota) dalam lingkup wilayah atau kawasan tertentu yang dilakukan secara serentak atau dalam waktu yang

bersamaan. Pada Tahun 2015 pemerintah pusat menyepakati diadakannya pilkada serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan pemerintahannya akan berakhir di tahun tersebut. Tujuan diadakannya pilkada serentak adalah untuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, dengan harapan dapat dilakukannya penghematan waktu, energi, dan anggaran pilkada yang tentunya tidak sedikit. Oleh karena itu hal ini tentunya tidak lepas dari diadakannya kampanye.

Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Kampanye politik merupakan gerakan serempak untuk menarik simpatikan dari khalayak secara universal. Namun dalam konteks ini sering terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh para elit-elit politik yang berusaha ingin mendapatkan sebuah keuntungan dari diselenggarakannya kampanye tersebut. Kebiasaan buruk tersebut sudah menjadi seperti tradisi dalam kampanye, baik itu terkait dengan ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana sering disaksikan dalam pengalaman-pengalaman kampanye yang haus terhadap kekuasaan, jabatan dan uang.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa masih banyak penyimpangan yang dilakukan para elit politik dalam berbagai pengambilan keputusan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Seperti halnya pada pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para

kandidat sangat memprihatinkan. Salah satu kandidat yang kebetulan satu partai dan masih ada tali persaudaraan dengan Kepala Daerah yang masih menjabat saat itu, tentunya mendapat dukungan penuh dari kepala daerah tersebut. Kepala daerah tersebut menekan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparatur Desa agar memilih dukungannya pada saat pemungutan suara nanti, dan apabila para PNS dan aparat Desa tidak membantu untuk memilih dukungannya akan mendapat balasan dari pejabat tersebut. Ancaman itu benar saja terjadi, tidak berselang lama dari diselenggarakannya pilkada, para PNS yang di tempat tinggal mereka kalah dalam penghitungan suara, semua PNS yang ada di Pekon/Kelurahan itu dimutasi atau dipindah tugaskan ke tempat lain.

Selain itu upaya pasangan calon lawannya pun tidak kalah bersaing dalam menarik simpatik masyarakat guna memperoleh suara terbanyak. Tetapi sama halnya meskipun tidak menekan masyarakat, ada cara lain yang digunakan untuk menjatuhkan pihak lawan. Pasangan calon ini berkata apabila kepala daerah tidak digantikan dengan pendatang baru maka masyarakat Lampung Barat masih tetap seperti sekarang untuk kedepannya. Merasa terintervensi atau selalu dalam tekanan dan cengkraman, tidak ada pembangunan dan sebagainya apabila tidak terganti dengan orang baru. Pasangan ini pun bersemboyan saatnya bergantian, saatnya perubahan.

Pemaparan di atas menyimpang dari etika kampanye yang tertera dalam undang-undang pemilu/pilkada. Sebagaimana menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Pasal

66 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota dalam Kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Larangan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum di atas para elit politik diharapkan berkomitmen dengan nilai-nilai edukatif persuasif dan tidak memaksa atau mengintimidasi masyarakat untuk menentukan hak pilihnya. Namun kampanye yang seharusnya dilaksanakan secara santun membawa kedamaian bagi masyarakat umum dan wahana silaturahmi bagi para peserta pilkada kini telah hilang. Politik adu domba, penyalahgunaan wewenang kekuasaan, pelanggaran kode etik, dan menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik kini tidak lagi diperhatikan demi kekuasaan duniawi.

Ketentuan menurut hukum Islam, persoalan politik dikenal dengan *fiqh siyasah*, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam *fiqh siyasah*, istilah pemilihan umum dikenal dengan *Intikhabah al-'ammah*. *Intikhabah* merupakan *jama' muannassalim* yang berasal dari kata *intikhaba-yantakhibu* yang artinya memilih. Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang dibentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam *fiqh siyasah*, partai

politik disebut dengan istilah *al-hizbal-siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.

Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Nabi Yusuf AS dalam QS Yusuf (12) ayat 55 yakni :

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi be"pengetahuan".⁹

Berdasarkan ayat di atas, menurut tafsir pendapat ulama al-Allamah al-Alusi (w.1270 H), ayat di atas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan). Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang di dalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan penyelenggaraan penterjemah Al-Qur'an, 2002), h. 193.

Keterangan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Fiqh Siyasah tentang Etika Kampanye Politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Lampung Barat”. Karena dalam memilih seorang pemimpin harus berdasarkan hati nurani dari masing-masing individu masyarakat, namun yang terjadi tidak seperti demikian atau tidak seperti yang tertera dalam Undang-undang Pilkada maupun syari’at Islam.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Etika Kampanye Politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pandangan politik Islam terhadap Etika Kampanye Politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada bab berikutnya, yaitu :

1. Bagaimana Etika Kampanye Politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Lampung Barat ?
2. Bagaimana pandangan politik Islam tentang Etika Kampanye Politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Lampung Barat ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana Etika Kampanye Politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Lampung Barat
- b) Untuk mengetahui bagaimana pandangan politik Islam tentang Etika Kampanye Politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Lampung Barat

2. Manfaat Penelitian

- a) Maafaat teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan tentang Etika Kampanye Politik bagi Fakultas Syari'ah pada umumnya dan bagi penulis khususnya.
- b) Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang Etika Kampanye Politik, khususnya Etika Kampanye Politik di Lampung Barat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan,¹⁰

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya dengan berdialog atau wawancara dengan objek

¹⁰ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.21.

penelitian.¹¹ Penelitian ini meneliti kondisi objek di lapangan tentang Etika Kampanye Politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Lampung Barat.

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam *Penelitian Deskriptif*, yakni “suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dari objek penelitian”.¹² Secara sederhana penelitian ini dapat dikatakan bersifat deskriptif eksploratif riset yang mengklasifikasikan data yang bersifat kualitatif.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari penelitian, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data secara langsung dari KPUD, tim kampanye kedua pasangan calon, dan masyarakat sebagai saksi mata / korban yang ada di Lampung Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diberikan kepada peneliti yang mana informasi tersebut berasal dari orang yang secara

¹¹ Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta : Sumbangsih, 1975), h. 2.

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung : Mandar Maju, 1996), Cet. Ke-7, h. 29.

tidak langsung mengamati objek yang diteliti, dalam hal ini yang menjadi sumber data sekundernya adalah bersumber dari internet.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹³ Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa yang dimaksud populasi adalah “keseluruhan objek penelitian”.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah KPUD Kabupaten Lampung Barat, kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau tim pemenangannya, serta masyarakat Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁵ Teknik sampling yang digunakan adalah tehnik non random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.¹⁶ Cara ini dianggap paling tepat

¹³Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

¹⁴Suharsimi Arikunto, prosedur *Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet, Ke-4 Edisi Revisi III, h. 62.

¹⁵Susiadi AS, *Ibid*.

¹⁶Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM, 1985), h.

untuk dipilih menjadi anggota sampel sehingga keobjektifan hasil penelitian dapat terjamin.

Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Sampel diambil tidak secara acak, melainkan ditentukan sendiri oleh peneliti, karena peneliti hanya akan mengambil sampel dengan beberapa pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Sampel dalam penelitian ini adalah :

1. 1 anggota KPUD Kabupaten Lampung Barat,
2. 1 tim sukses pasangan calon nomor urut 01,
3. 1 tim pemenang pasangan calon nomor urut 02,
4. 5 pegawai negeri sipil,
5. 2 Peratin, (Kepala Desa)
6. 3 Warga sekitar.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti.¹⁸

42. ¹⁷ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), h.

¹⁸ Arsyat Soeratmo, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP STIM KPN, 2008), h.84.

Berdasarkan jenisnya observasi dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- 1) Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang diteliti.
- 2) Observasi tidak langsung, yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya yang akan diteliti, misalnya dilakukan melalui flom, rangkaian slide atau rangkaian foto.

Penulis menggunakan metode observasi tidak langsung. Metode observasi penulis gunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menerapkan metode observasi *non partisipan*, dimana penulis berlaku sebagai pengamat. Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pelengkap, yaitu untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

b. Metode interview

Interview atau *wawancara*, adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar suaranya dengan suaranya sendiri.¹⁹ Penulis melakukan wawancara kepada 1 anggota KPUD Kabupaten Lampung Barat, 1 anggota tim sukses dan 1 tim pemenang kedua pasangan calon Bupati dan Wakil

¹⁹ P. Joko, Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta 2004), h.102.

Bupati Kabupaten Lampung Barat, 5 Pegawai Negeri Sipil dan warga setempat yang penulis anggap bisa memberikan informasi yang diperlukan

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memudahkan dalam menginterpretasi realita yang masih tersimpan di balik data. Karena penelitian ini berbentuk penelitian lapangan, maka wawancara adalah hal yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau pencarian informasi kemudian dibantu oleh data sekunder yang mendukung.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya. Metode ini digunakan sebagai pengumpulan data mengenai objek penelitian yaitu Analisis Fiqih Siyasah tentang Etika Kampanye politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Lampung Barat.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁰
- b. *Koding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategori-kategori,²¹ atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Penyusunan atau Sistematis data (*contructing atau systematizing*), yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.²²

6. Metode Analisa Data

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.²³ Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.”²⁴ Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

²⁰ Susiadi AS, *Ibid.* h.115.

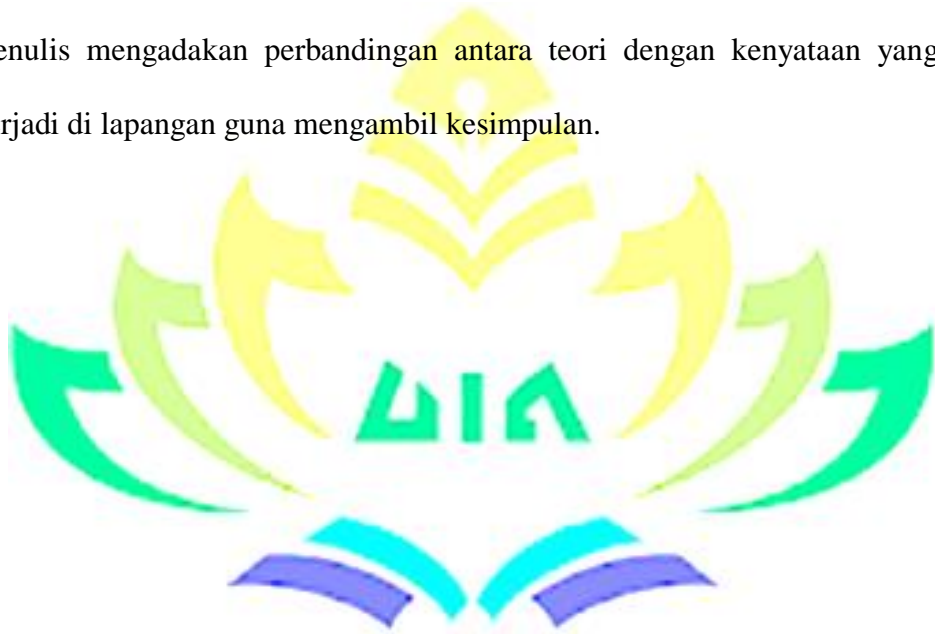
²¹ *Ibid.*

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Cet Ke-1, h. 9.

²³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

²⁴ *Ibid.* h. 127.

Selain itu penulis menggunakan metode Deduktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵ Pendekatan deduktif ini juga dapat digunakan dalam mengolah hasil penelitian lapangan. Penulis juga menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, lalu penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.



²⁵ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet Ke-1, h. 30.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Etika

a. Pengertian Etika

Etika adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang dan merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral.²⁶

Menurut Drs. H. Burhanudin Salam, etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membicarakan perihal suatu nilai-nilai serta norma yang dapat menentukan suatu perilaku manusia ke dalam kehidupannya. Menurut Poerwadarminto, arti etika adalah ilmu pengetahuan tentang suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Sedangkan menurut H. A. Mustafa, pengertian etika adalah ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memerhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal serta pikiran manusia.

Secara istilah, pengertian etika adalah cabang filsafat yang membahas baik buruknya tindakan manusia. Etika mencari kebenaran, dan sebagai filsafat ia mencari keterangan (benar) yang

²⁶ Suwardi K, Lubis, *Etika Propesi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafik: 2000), h. 2.

sedalam-dalamnya. Sebagai tugas tertentu bagi etika, ia mencari ukuran baik-buruknya suatu tingkah laku manusia, etika hendak mencari, tindakan manusia yang manakah yang baik. Mengingat tindakan manusia itu ada yang disengaja dan ada pula yang tidak disengaja, maka hanya tindakan manusia yang disengaja sajalah yang menjadi sorotan etika, yakni tindakan yang dihasilkan dari kehendaknya, tindakan yang sudah dipikirkan sebelumnya.

Etika ialah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral). Kesusilaan, yaitu keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang mengambil bentuk amar dan larangan. Kesusilaan mengatur manusia dan masyarakat agar tidak semauanya berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Manusia dibentuk oleh kesusilaan, ini berarti bahwa kehidupan alaminya seperti nafsu, kecenderungannya, cita-citanya dan sebagainya, seolah-olah disalurkan atau tertuang kedalam suatu bentuk tertentu. Manakala seseorang memenuhi syarat-syarat kesusilaan itu, prilakunya dan dia sendiri disebut baik (dari segi kesusilaan), dalam hal sebaliknya dikatakan buruk (dari segi kesusilaan).

Namun istilah etika dan moral sering tidak bisa dibedakan secara jelas oleh karena itu moral mengacu pada ahklak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut hukum atau kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Jadi etika dan moral mempunyai objek yang sama yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia

untuk ditentukan posisi baik dan buruknya. Namun etika dan moral mempunyai perbedaan, dengan demikian tolak ukur yang digunakan dengan moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Moral merupakan aturan-aturan normatif yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu.²⁷

Dengan demikian, etika dapat mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional, karena ia berfungsi sebagai ilmu dalam membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggung jawabkannya sendiri, tidak ada pertentangan tentang fungsi dan manfaat etika bagi kehidupan manusia, baik bersifat individu, kelompok, maupun masyarakat luas di dalam segala bidang.

b. Etika Dalam Ilmu Politik

Dalam konteks ilmu politik, terdapat dua tingkatan ilmu, yaitu:²⁸

- 1) Ilmu politik. Pada tingkatan ini, ilmu politik menggarap perumusan istilah, dalil-dalil yang membantu untuk mendeskripsikan proses-proses yang berlangsung, menyediakan strategi alternatif dalam kerangka skema tujuan sarana, pengamatan terhadap segala macam lembaga-lembaga politik, relasi dan interaksi antar mereka, klasifikasi berbagai ideologi dan sistem nilai politik dengan implikasi masing-masing.

²⁷ Ayi Sofyan, *Etika Politik*, (Bandung, Pustaka Setia: 2012), h. 38.

²⁸ *Ibid.* h.21.

2) filsafat politik yang di dalamnya terdapat etika politik. Filsafat politik bersifat metasains, tidak menggarap realitas secara langsung, tetapi menggarap realitas secara ilmiah oleh ilmu yang lebih spesifik, yaitu ilmu politik.

Secara substantif etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian “moral” senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat Bangsa maupun Negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya.

Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, Bangsa, maupun Negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut Negara serta masyarakat Negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.

Etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif.

Hukum dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Jadi etika politik membahas hukum dan kekuasaan.

Etika politik juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang terlibat secara kongkrit dalam pelaksanaan pemerintah Negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat Negara, aparat pelaksana, dan penegak hukum harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi juga harus berdasar pada legitimasi moral. Misalnya suatu kebijakan itu sesuai dengan hukum belum tentu sesuai dengan moral, contohnya gaji para pejabat Negara sesuai dengan hukum tetapi bila dilihat dari keadaan Negara maka hal tersebut tidak sesuai secara moral.

Inti permasalahan etika politik adalah masalah Legitimasi etis kekuasaan yang dapat di rumuskan dalam pertanyaan atas hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki? berapapun besarnya kekuasaan, selalu dituntut pertanggung jawaban. Karena itu, etika politik menuntut agar kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku (Legalitas), disahkan secara Demokratis (Legitimasi Demokratis) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (Legitimasi Moral). Ketiga tuntutan itu dapat disebut Legitimasi normatif atau etis.

Selanjutnya dijelaskan kriteria-kriteria legitimasi yaitu legitimasi sosiologis, legalitas, dan legitimasi etis. Legitimasi Sosiologis, Pahami sosiologis tentang legitimasi. Mempertanyakan motivasi-motivasi apakah yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima kekuasaan atau wewenang seseorang, sekelompok orang atau penguasa

Dengan demikian, etika dapat mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional, karena ia berfungsi sebagai ilmu, dalam membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggung-jawabkannya sendiri, tidak ada pertentangan tentang fungsi dan manfaat etika bagi kehidupan manusia, baik bersifat individu, kelompok maupun masyarakat luas di dalam segala bidang

c. Etika Dalam Kampanye Politik

Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.²⁹ Menurut Imawan kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya.³⁰ Sedangkan pengertian kampanye yang dikemukakan oleh Kotler dan Roberto adalah sebagai berikut: *“campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade other (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior* (kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu).

Menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Jadi berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah *purpose to something*. Yakni aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan

²⁹ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Arkola, Surabaya: 2001), h. 301.

³⁰ Muhammad Fauzi Nasution, *Etika Kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih Siyasah*, Skripsi (UIN SU, Medan: 2015), h.24.

perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kampanye adalah serentak mengadakan gerakan bisik, gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin. Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.³²

Merujuk pada definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan kampanye adalah sebuah tindakan ajakan bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referendum diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di

³¹ Cangara Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 223.

³² Muhammad Fauzi Nasution, *Ibid*. h. 24.

dalam suatu institusi. Kampanye juga memiliki ciri atau karakteristik yang lainnya, yaitu sumber yang jelas yang menjadi penggagas, perancang, penyampai sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (*campaign makers*), sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat. Selain itu pesan-pesan kampanye juga terbuka untuk didiskusikan, bahkan gagasan-gagasan pokok yang melatar belakangi diselenggarakannya kampanye juga terbuka untuk dikritisi.

Keterbukaan seperti ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik. Segala tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, yaitu mengajak dan mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan.

Kontek kampanye sangat diperlukan etika, baik peraturan yang mengatur yang bersumber dari undang-undang maupun etika budaya/kearifan lokal. Etika adalah hal yang sulit di jelaskan dengan cara yang pasti. Dalam konteks umum, etika (*ethics*) adalah kode prinsip dan nilai moral yang membangun perilaku seseorang atau sebuah kelompok yang berhubungan dengan benar dan salah.

Dilema etis (*Ethical Dilemma*) muncul dalam situasi yang menyangkut benar atau salah ketika nilai-nilai menjadi pertentangan. Individu yang harus membuat pilihan etis dalam sebuah organisasi

disebut agen moral. Pendekatan individualisme (individualism approach) mengatakan bahwa suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang tata cara bagi pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum dan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pejabat Negara mempunyai hak politik untuk ikut serta dalam kampanye pemilihan umum sepanjang berstatus sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, calon Presiden, calon Wakil Presiden, anggota Tim Kampanye, atau sebagai anggota Pelaksana Kampanye.

Bahwa untuk menciptakan keseimbangan antara hak politik Pejabat Negara dalam berkampanye dan kewajiban memelihara keberlangsungan tugas penyelenggaraan Negara dan pemerintahan daerah perlu mengatur pelaksanaan kampanye pemilihan umum bagi Pejabat Negara, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 39

ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara bagi pejabat Negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan

Pembahasan diatas dapat dipahami bahwa etika kampanye tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Manfaat etika kampanye bagi pelaksanaan sistem politik di Indonesia antara lain :³³

- 1) Etika diperlukan dalam hubungannya dengan relasi antara politik dan kekuasaan. Karena kekuasaan cenderung disalahgunakan maka etika sebagai prinsip normatif/etika normatif (bukan metaetika) sangat diperlukan. Etika di sini ada sebagai sebuah keharusan ontologis. Dengan memahami etika politik, para pejabat tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya.
- 2) Etika kampanye bertujuan untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pengambilan kebijakan para pejabat agar tidak menyalahi etika. Masyarakat sebagai yang

³³ <http://catat-kan.blogspot.com/2012/10/manfaat-etika-politik.html?m=1>

memiliki negara tidak bisa melepaskan diri dalam mengurus Negara.

- 3) Para pejabat dapat bertanggung jawab atas berbagai keputusan yang dibuatnya baik selama ia menduduki posisi tertentu maupun setelah meninggalkan jabatannya.

Tujuan utama etika kampanye adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Etika kampanye membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika kampanye yang direduksi menjadi sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara.

d. Prinsip Dasar Etika Politik³⁴

- 1) Pluralisme, dengan pluralisme dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralisme mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang. Lawan pluralisme adalah intoleransi,

³⁴ <http://catat-kan.blogspot.com/2012/10/lima-prinsip-dasar-etika-politik.html?m=1>

segenap paksaan dalam hal agama, kepicikan ideologis yang mau memaksakan pandangannya kepada orang lain. Prinsip pluralisme terungkap dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didiskriminasikan karena keyakinan religiusnya. Sikap ini adalah bukti peradaban dan kematangan karakter kolektif bangsa.

2) HAM, jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa? Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

3) Solidaritas Bangsa, Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar, keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesusialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing.

- 4) Demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tak ada manusia, atau sebuah elit, atau sekelompok ideologi, atau sekelompok pendeta/pastor/ulama berhak untuk menentukan dan memaksakan (menuntut dengan pakai ancaman) bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.
- 5) Keadilan sosial, merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud sebaik apa pun kandas apabila melanggar keadilan. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Keadilan social mencegah bahwa masyarakat pecah ke dalam dua bagian-bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling-paling bisa survive/bertahan di hari berikut.

2. Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Etika Kampanye Politik

a. Pengertian Etika Menurut Fiqih Siyasah

Menurut Abul Haq Anshari dalam *Islamic Ethis: Concepts And Prospects* bahwa sesungguhnya etika Islam sebagai sebuah disiplin ilmu atau subjek keilmuan yang mandiri tidak pernah ada pada hari ini. Menurutny kita tidak pernah menjumpai karya-karya yang mendefinisikan konsepnya, mengambar isu-isunya dan

mendiskusikan permasalahannya. Apa yang kita temukan justru diskusi yang dilakukan oleh berbagai kalangan penulis, dari kelompok filosof, teolog, ahli hukum Islam, sufi, dan teoretisi ekonomi dan politik dibidang mereka masing-masing tentang berbagai isu, baik yang merupakan bagian dari keilmuan mereka atau relevan dengan etika Islam.³⁵

Dikalangan muslim memandang bahwa etika itu sinonim dengan moral dan akhlak. Sebagaimana pengertian yang diberikan Rachmat Djatnika, bahwa secara etimologis akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari kata *akhlaqa-yukhliq-ikhlaqan*, sesuai dengan wazn *af'ala-yuf'ilu-if'alan* yang berarti perangai, tabiat, watak dasar, kebiasaan, sopan santun.³⁶

Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa pikir panjang dan renungan lagi.³⁷ Menurut Ibnu Maskawih, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran.

Pengertian etika tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma. Pembahasan yang berkaitan dengan konsep nilai (*value*) sebenarnya merupakan kajian yang sangat erat secara substansial dengan

³⁵ Boy ZTF, Pranada, *Filsafat : Sejarah Aliran Dan Tokoh*, (Malang: UMM Press, 2003), h. 65.

³⁶ M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, (Tranmisi Media Jakarta, Jakarta : 2012) h. 14.

³⁷ Azumardi Azra, Dkk, *Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Departemen Agama , 2002), h. 204.

persoalan etika, oleh karena itu kajian dalam persoalan nilai ini biasanya mempertanyakan apakah yang baik dan yang buruk atau seorang mesti berbuat baik secara tujuan yang bernilai. Khusus dengan karakteristik yang terakhir ini menyetuh pula mengenai apa dasar yang menjadi pembenaran suatu keputusan moral etika disebut baik atau tidak baik.

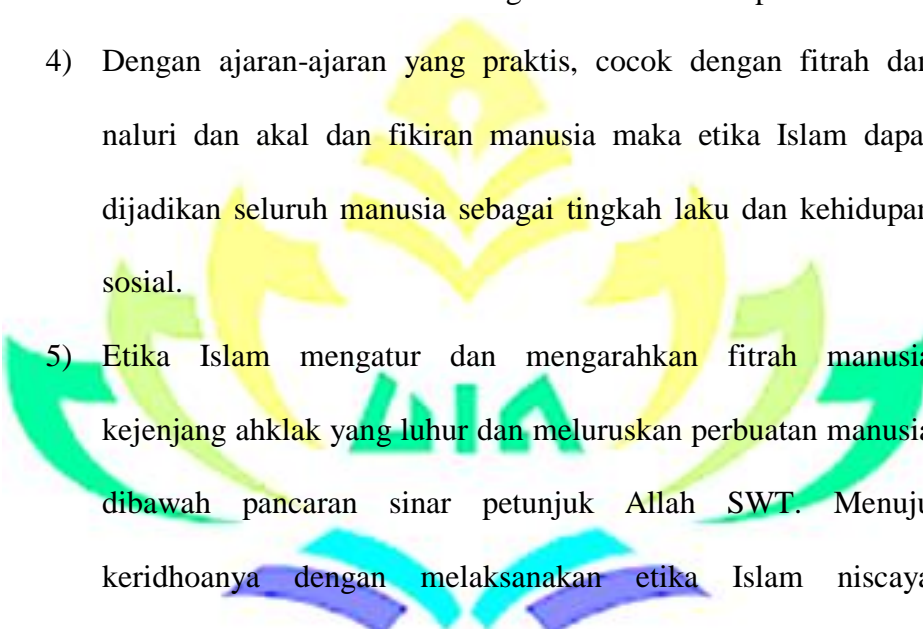
Batasan tentang ukuran baik dan buruk, sebagai cabang dari filsafat maka etika bertitik tolak dari akal fikiran yang murni, hal ini menyebabkan tidak berlakunya nilai-nilai agama, kenyataan inilah letak perbedaan yang mendasar etika secara umum dan etika Islam. Dalam pelajaran dikenal dengan ilmu ahklak yakni suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Ajaran etika Islam sesuai dengan fitrah dan akal fikiran yang lurus.³⁸

Menurut Hasbullah Bahri, memperinci etika Islam sehingga jelas perbedaannya dengan etika Filsafat. Perbedaan ini merupakan karakteristik etika Islam, perbedaan ini terdiri dari lima karakteristik etika Islam yakni:³⁹

- 1) Etika Islam mengajarkan dan menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk.

³⁸ Hasbullah Bakri, *Sistematika Filsafat*, (Wijaya, Jakarta: 1981), h. 4.

³⁹ Hamzah Ya'kub, *Etika Pembangunan Ahklakulkarimah Suatu Pengantar*, (Bandung : CV Diponogoro, 1981), h.14.

- 
- 2) Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan, merupakan ajaran Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulnya.
 - 3) Etika Islam bersifat universal dan komprehensif dapat diterima oleh seluruh umat manusia disegala waktu dan tempat.
 - 4) Dengan ajaran-ajaran yang praktis, cocok dengan fitrah dan naluri dan akal dan fikiran manusia maka etika Islam dapat dijadikan seluruh manusia sebagai tingkah laku dan kehidupan sosial.
 - 5) Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kejenjang ahklak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia dibawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT. Menuju keridhoanya dengan melaksanakan etika Islam niscaya selamatlah manusia dan fikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan.

Berdasarkan pengertian diatas tujuan etika Islam adalah penyerahan diri kepada Allah, artinya segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia semata hanya mencari ridho Allah SWT. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan ketentraman hidup. Dari uraian tersebut dapat dimengerti, bahwa tujuan tertinggi dari etika Islam adalah untuk mencari ridho Allah, yang dilandaskan Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dengan demikian manusia mampu untuk menemukan suatu kebahagiaan yang kekal dan abadi yang

merupakan wujud nyata dari janji Allah, maka keabadian tidak akan diraih apabila manusia itu sendiri memungkiri dari perintah-Nya.

Sedangkan etika Islam itu sendiri terbentuk oleh rukun Iman dan rukun Islam melalui proses ihsan, dan hal itu akan melahirkan amal shaleh. Namun penulis menyimpulkan pengertian etika Islam adalah ajaran tingkah laku manusia yang secara sengaja atau dilakukan secara sadar dimana dilihat dari segi baik buruk sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh agama. Dalam konteks inilah keimanan sangat signifikan fungsinya menjadi dasar pijakan setiap tingkah maupun perbuatan. Karena keimanan sempurna akan melahirkan kesempurnaan akhlak. Dengan perkataan lain keindahan akhlak manifestasi dari kesempurnaan iman, tidak di pandang orang itu beriman dengan sungguh-sungguh jika akhlaknya buruk.

b. Dasar Hukum Etika Dalam Fiqih Siyasah

Sebagaimana dijelaskan di atas Etika dalam Islam disebut dengan akhlak yang dari bahasa arab *al-akhlak* yang merupakan bentuk jamak dari *Al-Khuluk* yang berarti budi pekerti, tabiat, dan watak. Kata akhlak disebut dua kali, dan kedua-duanya dalam bentuk mufrad, yaitu khuluq.

Dasar akhlak bersumber pada Al-Qur'an, sebagaimana difirmankan pada surat Asy-Syu'ara (26) ayat 137 dan Al-Qalam (68) ayat 4 berikut :

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾

*“Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu”.*⁴⁰

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤٠﴾

*“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.*⁴¹

Ayat ini dinilai sebagai konsederan pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ini pula suatu pujian yang paling tinggi yang tidak ada taranya, di berikan Allah kepada Rasullnya Muhammad SAW. Walaupun secara fisik dan nalurinya sama dengan manusia biasa, tetapi dalam kepribadian dan mentalnya bukanlah seperti manusia pada umumnya, karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadi pemandu dan teladan bagi umat manusia seluruhnya Kemudian dalam ayat lain yakni QS Al-Ahzab (33) ayat 21 berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٣١﴾

*“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.*⁴²

Ayat diatas menerangkan bahwa pribadi Rasulullah SAW adalah contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan yang membentuk pribadi yang akhlakul karimah. Dalam Islam sendiri

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.* h. 522.

⁴¹ *Ibid.* h. 826.

⁴² *Ibid.* h. 592.

telah ditanamkan bagaimana etika berkomunikasi kepada sesama manusia khususnya di kehidupan sehari-hari seperti: *Qawlan Sadidan* berarti pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi (materi dan isi pesan) maupun redaksi (tata bahasa). Dari segi substansi, komunikasi Islam harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, hal yang benar saja, jujur, tidak berbohong, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. *“Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta” (QS. Al-Hajj:30). “Hendaklah kamu berpegang pada kebenaran (shidqi) karena sesungguhnya kebenaran itu memimpin kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga” (HR. Muttafaq ‘Alaih). “Katakanlah kebenaran walaupun pahit rasanya” (HR Ibnu Hibban).* Dari segi redaksi, komunikasi Islam harus menggunakan kata-kata yang baik dan benar, baku, sesuai kaidah bahasa yang berlaku. *“Dan berkatalah kamu kepada semua manusia dengan cara yang baik” (QS. Al-Baqarah:83). “Sesungguhnya segala persoalan itu berjalan menurut ketentuan” (H.R. Ibnu Asakir dari Abdullah bin Basri).*⁴³

Dalam setiap pelaksanaan kampanye Pemilu maupun Pilkada sering ditemukan pelanggaran etika seperti kampanye hitam, namun dalam Islam sendiri tidak dikenal kampanye hitam, tapi Islam

⁴³ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Logos 1999), h. 91.

mengqiyaskan dengan beberapa yang menjadi persoalan seperti fitnah, hasud, ghibah dan naminah.⁴⁴

1) Fitnah

Fitnah artinya: menyebarkan kabar tidak benar/rahasia (aib) seseorang kepada orang lain padahal orang itu tidak pernah melakukannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 217

...وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ...

“...dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh...”.⁴⁵

2) Hasud

Hasud yaitu usaha seseorang yang iri dan dengki untuk mempengaruhi orang lain supaya tidak suka atau memusuhi orang lain: sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud: *“Rasulullah SAW jauhkanlah dirimu dari hasud karena hasud itu memakan kabikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar”*.

3) Ghibah

Ghibah atau Menggunjing adalah membicarakan orang lain tentang suatu hal dengan cara menambah atau mengurangi serta mencari cari kesalahan orang tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hujurat (49) ayat 12

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.* h. 42.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
 إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ
 أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
 رَّحِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.*⁴⁶

4) Namimah

Istilah namimah sering diartikan adu domba (makna kias), mereka adalah orang yang pekerjaannya memecah belah terhadap kondisi yang baik menjadi tidak baik. Namimah atau adu domba adalah perilaku menyebar isu atau gosip terhadap suatu kondisi yang menjadikan orang lain (yang mendengar) mendorong untuk marah dengan tujuan agar orang lain saling berselisih atau bertengkar. Orang yang berperilaku namimah/adu domba senang mencari informasi tentang kesalahan/kenegatifan seseorang, ia senang membuat kabar rekayasa terhadap suatu kondisi setelah kabar itu diperoleh atau dibuat secara yakin, kemudian dikabarkan/dibiaskan lewat seseorang yang akhirnya orang yang terbias itu terpengaruh dan mencoba menyampaikan

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.* h. 743.

berita tersebut kepada orang lain pula. Akhirnya kabar tersebut sampailah kepada orang yang dituju/sasaran. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hujarat (49) ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِهِ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.*⁴⁷

Jika orang yang dituju tidak sadar/tidak sabar pula maka situasi akan menjadi panas, bahkan sering pula terjadi pertengkaran baik secara individu maupun kelompok. Untuk itu kita harus mempunyai sifat sabar terhadap informasi/kabar yang kita terima, jangan tegesa-gesa bereaksi jika belum tau pasti terhadap kabar tersebut. Akibat tindakan namimah/adu domba antara lain:⁴⁸

- a) Dibenci dan dijauhi orang lain
- b) Tidak mempunyai sahabat sejati
- c) Dibenci Allah dan dimasukkan kedalam neraka
- d) Akhir hidupnya menderita orang lain acuh terhadapnya
- e) Penyesalan, penderitaan dan keguncangan hidup merupakan tebusan perbuatannya

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Mafri Amir, Ibid. h. 125.

Adapun beberapa etika dalam berkampanye dari salah satu partai Indonesia, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengikrarkan dirinya sebagai partai dakwah harus sesuai dengan adab-adab Islam, di antaranya :⁴⁹

1) *Ikhlas* (Keikhlasan)

Ikhlas dan membebaskan diri dari motivasi yang salah dan rendah. Kampanye dalam Islam merupakan bagian dari amal shaleh dan ibadah, maka dari itu perlu diperhatikan keikhlasan niat dan ketulusan motivasi setiap hati nurani para penyelenggara, peserta terutama da'i dan juru kampanye. Agar kampanye yang dilakukan tidak hanya berdampak pada masalah-masalah keduniaan, tetapi juga mendapat keridhaan dan keberkahan Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Bayyinah (98) ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.*⁵⁰

Pada saat kampanye, faktor-faktor yang merusak keikhlasan harus dijaui. Arogansi atau kesombongan yang

⁴⁹ <http://www.Syariahonline.com>. Kamis, 18 Juli 2019

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.* h. 907.

disebabkan oleh banyaknya pengikut atau kelebihan lain, juga harus dihindari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal (8) ayat 47 yang berbunyi:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾

*“dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya' kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah. dan (ilmu) Allah meliputi apa yang mereka kerjakan”.*⁵¹

2) Tha'ah (Keta'atan)

Ta'at dan komitmen kepada seluruh aturan Allah, perundangan yang berlaku, dan arahan partai. Pada saat kampanye, terkadang larut dalam berbagai acara dan pembicaraan yang membuat lupa atau mengabaikan keta'atan kepada Allah, seperti kewajiban shalat. Bagi seorang muslim, saat berkampanye jangan sampai mengabaikan keta'atan kepada Allah apalagi sampai kepada tingkat melalaikan diri dan orang lain dari jalan Allah. Demikian halnya dengan keta'atan kepada aturan yang berlaku, dan arahan partai yang berkenaan dengan kampanye sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri, hendaknya diperhatikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Luqman (31) ayat 6:

⁵¹ Ibid. h. 240.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦٦﴾

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-lokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.⁵²

3) Uswah (Keteladanan)

Menampilkan dan menyampaikan program-program partai dengan cara dan keteladanan yang terbaik (Ihsan). Di antara etika kampanye yang terbaik dan simpatik adalah mengedepankan keunggulan partai yang bersangkutan, tanpa perlu menjelekkan dan mengejek orang, partai atau golongan lain seperti *black campaign*. Partai yang baik dan program yang bagus juga harus disampaikan dengan cara yang bagus dan profesional.

Di antara kampanye yang efektif adalah dengan cara memberi keteladanan yang terbaik. Bahasa perilaku sering lebih efektif daripada bahasa lisan. Kampanye adalah memikat dan menarik simpati orang. *Shidq* (Kejujuran) Jujur, tidak berdusta /berbohong atau mengumbar janji kejujuran merupakan salah satu kunci sukses berkomunikasi politik. Berbagai kebaikan akan menyertai kapan, dimana, dan siapa saja yang komitmen dengan kejujuran. Kampanye tidak boleh menghalalkan segala

⁵² *Ibid.* h. 580.

cara. Tujuan luhur tidak boleh dirusak oleh cara yang kotor. Berbohong adalah perbuatan terlarang dalam Islam, apalagi yang dibohongi itu orang banyak, sudah tentu bahayanya lebih berat. Berbohong adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kondisi yang tidak terkendali, juga bisa mengakibatkan seseorang larut dalam perilaku dan orasi yang cenderung mengumbar janji muluk yang tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini harus diperhatikan oleh seorang da'i/ juru kampanye. Janji pasti akan dipertanggungjawabkan di Akhirat. Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Israa' (17) ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.*⁵³

4) Ukhuwwah (Persaudaraan)

Tetap menjaga ukhuwah (persaudaraan), tidak ghibah, caci maki, dan cemooh. Kampanye bukanlah arena untuk memuaskan selera dan hawa nafsu. Perkataan yang diucapkan dan sikap yang ditampilkan harus senantiasa mencerminkan rasa ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh berprasangka buruk apalagi

⁵³ Ibid. h. 385.

melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, karena hal itu akan menimbulkan kerenggangan dan perseteruan yang mengganggu ukhuwah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujuraat (49) ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.*⁵⁴

5) Tarbawy (Edukatif)

Komitmen dengan nilai-nilai edukatif, persuasif dan tidak memaksa atau mengancam/mengintimidasi, tertib dan tidak mengganggu, dan menghindari acara yang kurang bermoral. Kampanye adalah salah satu sarana pendidikan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan, di samping sebagai sarana da'wah yang memiliki makna mengajak dengan cara persuasif, tidak memaksa atau mengintimidasi. Dalam kampanye tidak boleh memaksa dan memaksakan kehendak kepada orang lain. Termasuk mempengaruhi dan mempolitisir supaya menerima dan memberikan hak pilihnya kepada partai tertentu dengan berbagai cara yang bersifat memaksa atau terpaksa, seperti dengan cara politik uang. Dengan demikian,

⁵⁴ *Ibid.* h. 743.

kampanye edukatif ini menuntut setiap partai dan juru kampanye/da'i agar lebih inovatif, kreatif, dan proaktif. Massa pemilih mempunyai hak dan kebebasan memilih suatu partai sesuai dengan pilihan hati nurani. Sebagaimana dalam memeluk agama, manusia diberikan hak untuk beragama sesuai keyakinannya, apalagi dalam hal berpartai. Allah SWT. berfirman dalam surat Al Baqaarah (2) ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ...^ط

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)...".⁵⁵

Saat kampanye, juga harus diperhatikan hak orang lain terutama hak jalan. Jika kampanye menggunakan cara pengerahan masa dan sejenisnya, maka harus dilakukan secara tertib dan terkendali. Hak pengguna jalan harus diberikan dan dilarang merusak atribut partai lain. Demikian pula dengan acara atau hiburan yang tidak mendidik bahkan cenderung tidak moral. Karenanya harus dihindari hiburan yang menampilkan unsur pornografi pornoaksi dan hal-hal yang dilarang oleh agama, aturan maupun adat.

6) *Tawadlu'* (Rendah Hati)

Rendah hati, tidak menyombongkan diri, dan tidak mudah menuduh orang lain. Akhlak islam mengharuskan agar suatu partai tidak menganggap dirinya paling baik apalagi paling

⁵⁵ Ibid. h. 53.

benar, misalkan anggapan partainya adalah yang paling Islami, sedang orang lain dan partai lain tidak ada yang benar. Juga tidak mudah menuduh kalangan lain melakukan suatu kesesatan atau perbuatan bid'ah. Menyampaikan keunggulan sendiri boleh saja, tetapi tidak harus mengklaim apalagi menyombongkan diri sebagai yang terbaik atau paling Islami. Mengakui keterbatasan diri sebagai manusia dan keterbatasan partai sebagai kumpulan komunitas manusia adalah bagian dari sifat rendah hati yang disukai siapapun. Selanjutnya menggantungkan rencana dan program pada Allah SWT. Tujuan berpolitik dalam Islam tidak lain adalah mencari ridha-Nya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Najm (53) ayat 32 :

...فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَّقَى ﴿٣٢﴾

*“...Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa”.*⁵⁶

7) *Ishlah* (Perbaikan)

Memberikan nilai kemaslahatan, solusi, dan perbaikan bagi seluruh bangsa. Kampanye hendaknya dapat memberi kemaslahatan bagi bangsa baik material maupun spiritual, dan menghindari kampanye yang tidak berguna, sia-sia, apalagi menimbulkan dosa. Dalam hal pembuatan spanduk, stiker, atau perangkat kampanye lain, juga harus memuat pesan yang baik bagi masyarakat. Kampanye yang mengarah langsung pada

⁵⁶ *Ibid.* h. 767.

problem solving (pemecahan masalah) yang sedang dihadapi bangsa, seperti menggagas penyelamatan bangsa, shilaturrahim, aksi-aksi kepedulian sosial, advokasi, penyuluhan hukum, dan ceramah agama, lebih baik dari hanya sekedar slogan kosong.

c. Tujuan Etika Politik dalam Fiqih Siyash

Pemikiran Al-Ghazali tentang etika kuasa (politik) seperti dalam teorinya bagaimana cara menjalankan sebuah sistem kenegaraan yang mempertimbangkan moralitas untuk kemaslahatan bersama dengan pemimpin yang mempunyai integritas tinggi ditopang dengan kekuatan moral yang memenuhi beberapa kriteria yang Al-Ghazali idealkan.⁵⁷

Konsepsi etika politik Al-Ghazali adalah suatu teori sistem pemerintahan yang berisikan masyarakat dan aparatur negara yang mempunyai moral yang baik dengan ditopang oleh agama sebagai dasar negara. Seorang pemimpin yang ideal menurut Al-Ghazali adalah seorang yang mengerti tentang budi luhur atau moral agama dan kebijaksanaan yang harus diterapkan dalam menjalankan sistem pemerintahan.⁵⁸

Sudut pandang politik dalam perspektif Piagam Madinah adalah dapat dipandang sebagai tindakan politik yang santun dan memiliki unsur kewibawaan dan syakral sehingga dipandang memiliki makna komitmen tinggi dan religius karena ketaatan dalam

⁵⁷ Irfan Iris, *Islam dan Konstitusionalisme (Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia Modern)*, Pukap Indonesia, Yogyakarta : 2009. H. 68.

⁵⁸ *Ibid.* h. 278

memegang teguh sebuah kesepakatan. Hal tersebut dapat lestari dan sebagai uswah al-hasanah karena terdapat pesan-pesan nilai-nilai humanitis yang cukup tinggi.

Selain itu, Piagam Madinah dari sudut teori politik, dianggap memiliki gagasan-gagasan HAM modern meskipun lahir pada masa pra-modern, sebab pemerintahan Nabi di Madinah berhasil menyatukan suku-suku yang bertikai menjadi satu bangsa. Menyatukan suku-suku yang berkonflik ratusan tahun di sana bukan hal yang mudah, tetapi dengan kekuatan integritas moral yang kuat pada Nabi SAW masalah konflik dapat diatasi. Tercapainya kesatuan ini telah mempermudah beliau untuk melakukan pembangunan menurut Al-Qur'an sehingga terciptalah kesejahteraan rakyat.

Menurut beberapa riwayat, tidak ada pemberontakan berarti selama nabi memerintah. Yang terjadi justru, ketaatan penuh rakyat pada kepemimpinan Nabi. Pernik-pernik konflik terjadi hanya dengan negara-negara tetangga yang takut kehilangan pengaruh kekuasaannya.⁵⁹ Pasca-keempat khalifah, pemerintahan Islam mengalami pasang surut, yaitu jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 M ke tangan bangsa Mongol, dan tidak hanya mengakhiri khilafah Abbasiyah disana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan

⁵⁹ Ayi Sofyan, *Ibid.* h.16.

khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap dibumihanguskan oleh pasukan mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan.⁶⁰

M. Sidi Ritaudin mengatakan penyebaran etika Islam oleh Rasulullah SAW merupakan gerakan unik. Dikatakan unik karena tidak adaandingannya, ia meliputi semua kehalusan rohani manusia dan perhatian khusus kepada setiap gerak pikiran dan kesadaran yang berasal dari batin manusia.⁶¹ Prinsip dalam berpolitik hendaknya memperhatikan tentang nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kerukunan, nilai kerakyatan, nilai keadilan sosial, nilai kutuhan bangsa, dan nilai-nilai kasih sayang. Karena politik yang dimaksud adalah untuk mengatur banyak ummat sehingga diperlukan etika dalam berpolitik. Pengertian etika politik mengandung tiga tuntutan:

- 1) Upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain,
- 2) Upaya memperluas lingkup kebebasan,
- 3) Membangun institusi-institusi yang adil.

Tiga tuntutan tersebut saling terkait, hidup baik bersama dan untuk orang lain tidak mungkin terwujud, kecuali apabila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan, kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan.⁶²

⁶⁰ Badri Yatim *Sejarah Peradaban Islam (Disarah Islamiyah II)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2003. h. 111.

⁶¹ M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, (Tranmisi Media, Jakarta: 2012),h. 104.

⁶² Ayi Sofyan, *Ibid.* h. 58.

d. Ciri-Ciri Etika Politik Islam

Taat kepada pemerintahan yang sah merupakan ajaran didalam Islam, hal tersebut dapat disimak dalam perintah Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (4) Ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".⁶³

Ayat tersebut tidak ada ajaran untuk berbantah-bantahan dan saling caci maki namun lebih menekankan pada mufakat yang baik dengan bermusyawarah dimana kembali kepada perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Nabi manakala terjadi kebuntuan dalam permusyawaratan tersebut.

Hal ini perlu pembelajaran bagi calon masing-masing kandidat untuk memegang mufakat yang baik dan santun serta menghindari fitnah untuk menjaga stabilitas dan kedamaian bersama. Untuk penegakan etika dalam kampanye politik diperlukan acuan

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.* h. 114.

sebagai prinsip dasar yang harus ditaati oleh setiap partai politik peserta pemilu, yakni sebagai berikut :⁶⁴

- 1) Perlu adanya kesadaran peserta atau pelaku kampanye untuk bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan, termasuk pihak-pihak para pejabat birokrat yang tidak diperkenankan melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan dirinya atau golongannya. Kesadaran datang dari diri sendiri pada masing-masing setiap individu, maka komitmen personal juga perlu dikembangkan pada masing-masing individu tersebut. Jika individu yang bersangkutan berdiri sebagai calon pelaku peserta kampanye hukumnya menjadi wajib meningkatkan komitmen diri dengan kesadaran penuh untuk tunduk pada kebenaran yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau nilai-nilai dalam Islam.
- 2) Adanya kesadaran moral para pelaku kampanye untuk mengatakan dan melakukan apa yang baik dan patut, serta menolak untuk mengatakan dan melakukan untuk disampaikan kepada publik. Kampanye tidak boleh mengarah pada pembohongan dan pembodohan publik. Suara dan dukungan harus diperoleh dengan jalan yang sebaik-baiknya. Perbuatan

⁶⁴ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik (Konep, Teori, dan Strategi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2009. h. 445.

bohong adalah perbuatan tercela hal ini telah disepakati oleh masyarakat secara luas sehingga jika melakukan kebohongan dengan janji-janji palsu atau memelintir sebuah kebohongan yang dikemas dengan rapi agar tidak kelihatan bohong apalagi berhubungan dengan kepentingan ummat, hal tersebut adalah melanggar kebenaran yang telah dipedomani masyarakat yang merujuk pada hukum agama dimana dalam Agama Islam hal tersebut sebuah larangan.

3) Adanya kejujuran merupakan norma dan nilai yang paling hakiki dalam berkampanye sebab ia mempertaruhkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan pemerintah. Untuk kepentingan jangka panjang, kiranya kejujuran merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jujur sebagaimana tersebut adalah diperintahkan dalam Islam, karena kejujuran adalah nilai ajaran agama Islam yang sangat tinggi. Pelaku ketidak jujuran akan berdampak pada cacat moral secara pribadi, sedangkan jika berakibat merugikan orang lain maka dampak yang dihasilkan adalah kerugian beruntun.

4) Adanya sopan santun (etiket) yang perlu diperhatikan karena menunjukkan kedewasaan para pelaku kampanye dan menjadi kriteria yang menakar bobot dari pemilu itu sendiri. Misalnya saling menghormati dan menghargai sesama peserta pemilu, tidak mencurangi dan menghujat serta tidak menjelek-jelekkan

partai lain. Menghindari kekerasan dan menjauhkan slogan-slogan yang tidak mendidik masyarakat baik yang bersifat lisan maupun tertulis. Slogan dalam kampanye sebenarnya tidak diperlukan karena masyarakat tidak membutuhkan slogan semata tetapi informasi yang real dan positif serta menenangkan. Hal tersebut akan membawa ke arah keseimbangan, dengan demikian olok-olokan merupakan pekerti yang jauh dari harapan masyarakat dan Islam.

5) Adanya pertanggung-jawaban secara transparan baik dalam bentuk sumber dan penggunaan keuangan maupun dalam hal permulaan kampanye. Tidak boleh mencuri start dan menggunakan waktu pascakampanye di saat minggu tenang, dan lingkungan harus dijaga untuk tidak dikotori. Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut telah diketahui atau lebih jauh telah disepakati oleh masing-masing peserta pemilu atau tidak, kalau memang hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama maka wajib hukumnya untuk tunduk dan patuh pada rambu-rambu yang ada.

6) Adanya kedamaian. Kampanye tidak boleh mengganggu jalannya roda kegiatan masyarakat, dalam artian tidak adanya keributan dan kerusuhan. Kerusuhan dan sejenisnya tersebut akan merugikan kepentingan umum, artinya bukan hanya seorang atau lebih sebagai pesaing dalam pemilihan umum

tetapi melukai hak umum. Akibat dari melukai atau menciderai tersebut bukan ajaran Islam tetapi kesewenang-wenangan yang justru diberantas oleh rasulullah SAW. Maka suri tauladan adalah menjadi misi utama dalam menanamkan atau mengembangkan ajaran Islam.

- 7) Adanya ketertiban. Untuk itu, para peserta kampanye harus bisa dikendalikan, tertib dan tidak menimbulkan keributan. Ketertiban diperlukan karena berkaitan dengan banyak orang selain itu adalah agar dapat dibedakan antara komunitas hewani dengan kelompok insani. Untuk itu, etika politik atau kampanye harus dimiliki oleh setiap aktor politik. Etika politik diperlukan untuk memelihara kesantunan dalam berpolitik dengan menghargai dan menaati legitimasi yang merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum dan peraturan perundangan. Johannesen, mengutip pendapat Wallan, menyebutkan ada empat moralitas etika yang berakar pada nilai demokrasi yaitu : Mengembangkan budaya kritis, menumbuhkan kebiasaan bersikap adil, mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, dan menanamkan kebiasaan menghormati perbedaan pendapat. Dalam implementasi 4 hal tersebut tetap perlu memperhatikan berbudaya politik beretika, memperhatikan keutuhan dan persatuan bangsa,

menomorsatukan nilai dan norma yang dianut oleh bangsa itu sendiri.

Tim sukses adalah bagian dari tim untuk mensukseskan salah satu kandidat yang diunggulkan maka prinsip dakwah perlu dipegang untuk menyampaikan pesan tentang visi dan misi kandidat tersebut dengan tidak keluar dari ajaran Islam itu sendiri yakni memegang teguh Al-Qur'an dan Hadis serta Ijma' Ulama maupun Qiyas. Al-Qur'an dalam Surah An-Nahl (16) ayat 125 menjelaskan :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah⁶⁵ dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.⁶⁶

Tafsiran ayat diatas menurut tokoh yang oleh masyarakat Indonesia dianggap bapak bangsa sekaligus bapak plurasime menafsirkan “Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah”. Artinya dengan cara yang bisa diterima orang lain dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian "wa al-mauidlatul hasanah", tutur kata yang baik, "wa jadilhum bi allati hiya ahsan", artinya

⁶⁵ Hikmah yg dimaksud dalam ayat ini ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.* h. 383.

berdiskusilah dengan baik, rasional, dan sebagainya”. Sebab ajakan yang tidak mungkin bisa diterima oleh orang lain akan menciderai hak dasar manusia otomatis juga melukai prinsip beragama dalam Islam, sementara melakukan perbuatan yang tidak seirama dengan prinsip agama Islam berarti berseberangan dengan asas dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Abdurrahman Wahid mengatakan, demokrasi harus berlandaskan kedaulatan Hukum dan persamaan setiap warga Negara tanpa membedakan latar belakang Ras, Suku, Agama, dan Asal-muasal di muka undang-undang.

Seorang juru kampanye tidak perlu terlalu muluk-muluk berorasi kalau akhirnya hanya seperti nasi yang sudah basi, sulit dicerna oleh masyarakat awam. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW sendiri telah menawarkan trik-trik dalam berkomunikasi, “Berkomunikasilah pada masyarakat sesuai dengan kadar kemampuan berpikir mereka”. Dalam ilmu komunikasi, khususnya yang menyangkut dengan komunikasi masa meliputi beberapa aspek etis, misalnya menerapkan etika kejujuran dan obyektivitas berdasarkan fakta, berlaku adil atau tidak memihak dengan menulis berita secara berimbang, serta menerapkan etika kepatutan atau kewajaran.

Prinsip-prinsip tersebut diatas telah ada dan disepakati oleh para pihak sejak awal Indonesia merdeka yang bahkan sebelum

merdeka pun telah dikembangkan oleh para mubaligh dan tokoh-tokoh agama lainnya termasuk Islam. Oleh karenanya kenapa Islam masih eksis di bumi pertiwi ini karena memang sejak kedatangannya di Indonesia juga melalui jalur persamaan persepsi tentang hak dan asas dasar manusia bersama agama dan kepercayaan lokal bangsa Indonesia pada zamannya.⁶⁷

3. Konsep Pilkada Serentak

a. Pengertian Pilkada Serentak

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁸ Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi consensus politik nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004.⁶⁹

Sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

⁶⁷ Ahmad Syafi'i, *Kajian Hukum Islam Tentang Kampanye Politik Sebagai Pembelajaran Akhlak* (Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya), Jurnal Ilmiah.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pasal 1 ayat 4.

⁶⁹ Eko Prasjo, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguh Kurniawan, *Desentralisasi & Pemerintahan daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, 2006, h 40.

Namun sejak Juni 2005 Indonesia menganut sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Pilkada serentak merupakan sebuah proses Demokrasi dimana dilakukan pemilihan terhadap Kepala Daerah baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dalam lingkup Wilayah tertentu yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, adalah pemilihan Kepala Daerah, baik di wilayah Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, dalam waktu yang bersamaan di beberapa daerah yang dimana pemilihan tersebut dilakukan secara langsung oleh penduduk setempat.

Sejak tahun 2005 di Indonesia dikondisikan sebuah prosedur demokratis yang baru untuk mengganti dan mengisi jabatan Kepala Daerah, yang secara konseptual disebut Pilkada. Dalam skenarionya dibayangkan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan Pilkada. Melalui Pilkada itu penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas merdeka mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan aspirasinya yang beragam, dan semestinya dengan rasionalitasnya masing-masing. Dalam kaitan itu setiap aktor yang menjadi kandidat dituntut harus membuat komitmen politik, sebagai tafsir lain dari pentingnya kontrak sosial, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,

yang isu pokoknya biasanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan sosial.⁷⁰

Pilkada sebagai perhelatan politik, sejatinya merupakan sebuah panggung yang mempertunjukkan sebuah dramaturgi. Masalahnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan politik demokratis tidaklah membutuhkan dramaturgi yang memposisikan mereka hanya sekadar sebagai penonton pasif. Pilkada itu diidealkan harus adil, dan asas keadilan dimaksud bukan hanya dalam kerangka tidak ada pilih kasih dari pihak penyelenggara, tetapi juga harus adil dalam memperlakukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya.

Harapannya melalui pilkada akan lahir pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. Ekspektasi rakyat ini juga menuntut perubahan besar yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.⁷¹

⁷⁰ Mukhtar Sarman, *Pilkada Serentak : Quo Vadis Kedaulatan Rakyat, Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat*, Banjarmasin, 2015, h.14.

⁷¹ *Ibid.* h.8.

b. Fungsi Pemilu

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilu pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilu itu sendiri adalah:⁷²

1) Sebagai Sarana Legitimasi

Politik Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Pemerintahan berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

2) Fungsi Perwakilan Politik.

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

3) Sebagai Sarana Pendidikan

⁷² Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilu Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, (Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta. 1998), h.8.

Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi. Pendidikan politik ini dilakukan oleh partai politik karena partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷³

Penekanan Pembukaan UUD 1945 pada kedaulatan rakyat memberikan salah satu arti bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi, oleh karena itu sistem yang ada dalam pemerintahan maupun kehidupan bernegara haruslah dijiwai oleh kedaulatan rakyat atau demokrasi dan karenanya Pasal-Pasal yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 berafsan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Pembukaan UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa disusunlah kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia yang

⁷³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

berkedaulatan rakyat. Menurut C. S. T. Kansil, kedaulatan itu merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Seperti diketahui salah satu unsur dari Negara yaitu adanya pemerintahan yang berkedaulatan oleh karenanya, pemerintah dalam suatu Negara harus memiliki kewibawaan (authority) yang tertinggi (supreme) dan tak terbatas (unlimited).⁷⁴ Dalam arti kenegaraan, kekuasaan tertinggi dan tak terbatas dari Negara tersebut adalah kekuasaan memilih dan tertinggi dalam suatu Negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah lain.

c. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) merupakan konsekuensi pembagian wilayah Indonesia ke dalam wilayah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945. Pemilihan kepala daerah yang dikenal saat ini yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁷⁵

⁷⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1997), h. 80.

⁷⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Seperti yang telah dikemukakan bahwa tiap-tiap Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota. Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki pemerintahan daerah tersendiri. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁶ Pembagian wilayah negara ke dalam daerah-daerah seperti disebutkan diatas diatur oleh suatu pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya berasal dari partai politik. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemberian otonomi daerah tidak lain adalah dalam rangka peningkatan kemakmuran dalam termasuk peningkatan perekonomian daerah. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah :⁷⁷

- 1) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah
- 2) Untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan masyarakat pada masing-masing daerah

⁷⁶ Pasal 1 ayat (22) UU nomor 8 tahun 2015

⁷⁷ Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta:1997), h. 110.

- 3) Untuk meningkatkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat masing-masing daerah
 - 4) Untuk meningkatkan demokrasi kehidupan bangsa dan negara.
- Menurut Sarundajang, pemberian otonomi kepada daerah mempunyai 4 (empat) tujuan yaitu :⁷⁸
- a) Dari segi politik adalah mengikut sertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan menuju proses demokrasi di lapisan bawah;
 - b) Dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat.
 - c) Dari segi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhannya.

⁷⁸ Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah*, (Pusraka Sinar Jaya, 2001), h. 130.

- d) Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna pencapaian kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Namun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, tampaknya yang paling menonjol di sini adalah pemilihan Kepala Daerah dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Artinya rakyatlah yang secara langsung memilih siapa Kepala Daerah. Hal ini tentu saja merupakan terobosan baru dalam menafsirkan demokrasi yang ditentukan oleh konstitusi. Pasal 18 ayat (4) UUD Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjabarkan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945 dengan menentukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.⁷⁹

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Oleh karena itu jika undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan ruang yang luas terhadap pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini memang merujuk ke Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 itu.

Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat

⁷⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

maupun daerah. Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dengan demikian Kepala Daerah yang terpilih benar-benar representatif. Aspirasi rakyat lebih terakomodasi dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tetap berjalan sampai saat ini. Diawali dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diganti menjadi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan secara langsung tetap dilakukan.

Dasar hukum untuk Pemilihan Kepala Daerah saat ini adalah undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi undang-undang. Perbedaan yang membuat perubahan besar dalam sejarah pemilihan kepala daerah yaitu pada Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan ; “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Artinya pada Pilkada serentak, pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia sesuai waktu yang telah ditetapkan KPU.

Pelaksanaan secara serentak ini diharapkan anggaran biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan Pilkada menjadi lebih minim. Maka keputusan untuk diterapkannya sistem pemilu serentak mulai tahun 2015 dapat dijadikan momentum untuk penguatan sistem pemerintahan serta dengan benar dimanfaatkan untuk konsolidasi demokrasi yang lebih produktif dan efisien serta penguatan sistem pemerintahan presidensial.

B. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada judul karya ilmiah yang serupa dengan judul skripsi ini. Akan tetapi ada karya ilmiah yang membahas permasalahan yang hampir serupa pernah ditemukan, diantaranya:

1. Independensi Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Barat (studi kasus di Kecamatan Sekincau), karya Heri Agustawan, Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, 2016. Fokus kajian permasalahannya tentang sejauh mana keterlibatan PNS dalam kemenangan pemilihan Kepala Daerah Lampung Barat. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada keterlibatan PNS menjadi peserta kampanye, tetapi hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran karena dalam proses kampanye politik PNS hanya menjadi peserta kampanye dan tidak merugikan Negara, dikarenakan tidak memakai atribut kampanye, tidak dalam jam dinas, tidak memakai fasilitas Negara, dan tidak sebagai pelaksana kampanye.

2. Strategi pemenangan pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antoni dalam Pemilukada serentak 2015 di Way Kanan. Karya Rasniati, Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, 2016. Fokus kajian tentang bagaimana strategi pemenangan Raden Adipati dan E. Antoni dalam Pemilukada serentak 2015 di Way Kanan. Hasil penelitian tersebut adalah menggunakan teori *Swot*, yaitu pendekatan-pendekatan dengan masyarakat dengan cara turun langsung untuk bertatap muka sehingga benar-benar memahami yang menjadi keluhan masyarakat, Menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, membangun kerjasama yang baik dan solid dengan tim, Mencari tahu kekuatan dan kelemahan lawan serta peluang yang bisa dimanfaatkan, mengembangkan isu-isu yang ada dengan cara mengblow up (meledakkan) kelemahan lawan.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Liwa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991.⁸⁰ Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu pemekaran dari Lampung Utara, yang ber-ibukota di Liwa. Tentang asal-usul nama Liwa, menurut cerita masyarakat, berasal dari kata-kata "meliwa" (Bahasa Lampung), artinya membeli ikan. Konon dahulunya Liwa merupakan daerah yang subur, persawahan yang luas, sehingga hasil pertaniannya melimpah. Liwa juga nama salah satu marga dari 84 marga di Lampung.⁸¹

Kabupaten Lampung Barat dikenal dengan julukan Sekala Beghak. Sekala Beghak adalah kawasan yang sampai kini dapat disaksikan warisan peradabannya. Kawasan ini adalah kawasan yang sudah hidup sejak masa prasejarah. Batu-batu menhir mensitus dan tersebar di sejumlah titik di Lampung Barat. Bukti bahwa adanya tanda kehidupan sejarah, sebuah batu prasasti di Bunuk Tenuar, Liwa berangka

⁸⁰ Aliyanto, Staf Badan Pusat Statistik, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 1 Agustus 2019

⁸¹ Ali Rohman, Tokoh Adat, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 1 Agustus 2019

Tahun 966 Saka atau Tahun 1074 Masehi, menunjukkan ada jejak Hindu di kawasan tersebut. Bahkan di tengah rimba ditemukan bekas parit dan jalan Zaman Hindu. Adapun daerah Kenali yang dikenal sekarang sebagai Kecamatan Belalau atau kepaksian Belunguh, adalah bekas kerajaan bernama “*Kendali*” dengan “*Raja Sapalananlinda*” sebagaimana disebut dalam “*Kitab Tiongkok Kuno*”. Kata “*Sapalananlinda*” oleh L. C. Westenenk ditafsir sebagai berasal dari kata “*Sribaginda*” dalam pengucapan dan telinga orang Cina. Jadi bukanlah nama seseorang melainkan gelar penyebutan. Dalam buku itu konon juga menyebut, bahwa Kendali itu berada di antara Jawa dan Siam-Kamboja. Kitab itu, menyebut angka Tahun antara 454 – 464 Masehi. Kitab ini telah disalin ke dalam bahasa Inggris oleh Groenevelt.

Di wilayah Skala Brak ini pula pernah berdiri sebuah kerajaan. Ada yang menyebut kerajaan tersebut adalah Kerajaan Tulang Bawang, namun bukti-bukti keberadaannya sulit ditemukan. Sedangkan keyakinan yang terus hidup dan dipertahankan masyarakat khususnya di Lampung Barat serta keturunan mereka yang tersebar hingga wilayah Sumatera Selatan, menyebutnya Kerajaan Sekala Beghak. Pendapat ini juga disokong oleh keberadaan para raja yang bergelar Sai Batin, hingga bukti-bukti bangunan dan alat-alat kebesaran kerajaan, upacara, dan seni tradisi yang masih terjaga.⁸²

⁸² *Ibid.*

Dalam peta Provinsi Lampung saat ini, kisaran lokasi pusat Sekala Beghak berada di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat, sebagian Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pusat kerajaan meliputi daerah pegunungan di lereng Gunung Pesagi di daerah Liwa, seputar Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Sukau, Kecamatan Belalau, dan Kecamatan Balik Bukit.

Sebagai kesatuan politik Kerajaan Sekala Beghak telah berakhir. Tetapi, sebagai kesatuan budaya (*cultural based*) keberadaannya turun-temurun diwarisi melalui sejarah panjang yang menggurat kuat dan terbaca makna-maknanya hingga saat ini. Sekala Beghak dalam gelaran peta Tanah Lampung terlihat bahwa sebaran pengaruh kebudayaannya sampai saat ini masih terlihat. Tata kehidupan berbasis adat tradisi Sekala Beghak juga masih dipertahankan dan dikembangkan. Terutama Sekala Beghak setelah dalam pengaruh “*Empat Umpu*” penyebar agama Islam dan lahirnya masyarakat adat Sai Batin. Adat dan tradisi terus diacu dalam tata hidup keseharian masyarakat pendukungnya dan dapat menjadi salah satu sumber inspirasi dan motivasi pengembangan nilai budaya bangsa.

Hasil pembacaan atas segala yang ada dalam masyarakat berkebudayaan Sai Batin di Lampung, memperlihatkan kedudukan dan posisi penting Sekala Beghak sebagai satuan peradaban yang lengkap dan terwariskan. Keberadaan Sekala Beghak tampak sangat benderang dalam

peta kebudayaan Sai Batin, sebagai satu tiang sangga utama pembangun masyarakat Lampung. Bahkan telah diakui bahwa Sekala Beghak adalah sebagai cikal bakal atau asal muasal tertua leluhur Suku Lampung. Keberadaan Sekala Beghak berada dalam kisaran waktu strategis perubahan peradaban besar di Nusantara, dari Hindu ke Islam.

Pada abad 15 kedatangan empat kelompok masyarakat yang menduduki sekitar Danau Ranau. Di sebelah barat danau dihuni oleh orang-orang yang datang dari Pagaruyung Sumatera Barat dipimpin *Adipati Alam Padang*. Sementara itu, tiga kelompok lainnya berasal dari Sekala Beghak. Tiga kelompok orang-orang Sekala Beghak tersebut dipimpin Raja *Singa Jukhu (dari Kepaksian Bejalan Diway)*, menempati sisi timur danau. Di sisi timur danau pula, kelompok yang dipimpin Pangeran *Liang Batu* dan Pahlawan *Sawangan (berasal dari Kepaksian Nyekhupa)* bertempat. Sementara kelompok yang dipimpin *Umpu Sijadi Helau* menempati sisi utara danau. Umpu Sijadi Helau yang disebut-sebut itu bukan *Umpu Jadi* putra *Ratu Buay Pernong*, yang menjadi pewaris takhta Buay Pernong. Kemungkinan besar Umpu Sijadi di daerah Ranau tersebut adalah keturunan Kepaksian Pernong yang meninggalkan Kepaksian dan mendirikan negeri baru di Tenumbang kemudian menjadi Marga Tenumbang.⁸³

Ketiga kelompok dari Sekala Beghak ini kemudian berbaur dan menempati kawasan Banding Agung, Pematang Ribu, dan Warkuk.

⁸³ *Ibid.*

Sampai sekarang banyak masyarakat Banding Agung mengaku keturunan Paksi Pak Sekala Beghak. Disamping itu, ada kisah-kisah perpindahan orang Sekala Beghak, yang dipimpin Pangeran Tongkok Podang, Puyan Rakian, Puyang Nayan Sakti, Puyang Naga Berisang, Ratu Pikulun Siba, Adipati Raja Ngandum, dan sebagainya. Bahkan, daerah Cikoneng di Banten ada daerah yang diberikan kepada Umpu Junjungan Sakti dari Kepaksian Belunguh atas jasa-jasanya, dan banyak orang Sekala Beghak yang migrasi ke sana atau sebaliknya.⁸⁴ Kisah-kisah ini memperkuat suatu kenyataan bahwa Sekala Beghak tidak hanya sebagai sumber muasal secara geografis, melainkan juga sumber kultur masyarakat. Sekala Beghak adalah hulu suatu kebudayaan masyarakat. Dari Sekala Beghak ini juga lahir huruf Lampung yaitu Aksara Lampung yang berbunyi *ka-ga-nga*. Bagi sebuah kebudayaan, memiliki bahasa dan aksara sendiri merupakan bukti kebesaran masa lalu kebudayaan tersebut. Di Indonesia hanya sedikit kebudayaan yang memiliki aksara sendiri, yaitu Batak, Lampung (Sumatera Selatan), Jawa, Sunda, Bali, dan Bugis. Dan kebudayaan yang memiliki aksara sendiri dapat dikategorikan sebagai kebudayaan unggul. Karena bahasa merupakan alat komunikasi sekaligus simbol kemajuan peradaban.

Semua aksara Nusantara tersebut berasal dari bahasa Palava, yang berinduk pada bahasa Brahmi di India. Bahasa Palava digunakan di India dan Asia Tenggara. Di Nusantara, bahasa ini mengalami penyebaran dan

⁸⁴ *Ibid.*

pengembangan, bermula dari bahasa Kawi, sebagai induk bahasa Nusantara. Dari bahasa Kawi menjadi bahasa: Jawa (Hanacaraka), Bali, Surat Batak, Lampung/Sumatera Selatan (Kaganga), dan Bugis. Dari Kerajaan Sekala Beghak yang telah memiliki unsur-unsur “kebudayaan lengkap” ini pulalah “ideologi” Sai Batin dilahirkan dan disebarluaskan. Sampai saat ini, masih banyak yang bisa dibaca dari jejak-jejak yang tertinggal. Baik dari jejak fisik maupun jejak yang tidak kasat mata. Dari legenda, seni budaya, adat tata cara, bahasa lisan tulisan, artefak benda peninggalan, hingga falsafah hidup masih ada runut rujukannya. Dari Sekala Beghak tersebut di kemudian hari pengaruh budaya dan peradabannya berkembang dan berpengaruh luas ke seluruh Lampung bahkan sampai ke Komering di Sumatera Selatan sekarang.

2. Wilayah Administratif Lampung Barat

Lampung Barat dengan luas wilayah 2.064,40 km² terletak pada koordinat 4° ,47',16"-5° ,56',42" lintang selatan dan 103° ,35',08" – 104° ,33',51" Bujur Timur.⁸⁵

Tabel : Luas Wilayah, jumlah Pekon/Kelurahan, dan Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah pekon	Jumlah kelurahan	Ibu Kota Kecamatan
1	Balik Bukit	175,63	10	2	Pasar liwa
2	Sukau	223,10	10	0	Buay nyerupa
3	Lombok seminung	22,40	11	0	Lombok

⁸⁵ Aliyanto, *Ibid.*

4	Belalau	217,93	10	0	Kenali
5	Sekincau	118,28	4	1	Pampangan
6	Suoh	170,77	7	0	Sumber agung
7	Batu brak	261,55	11	0	Pekon balak
8	Pagar dewa	110,19	10	0	Basungan
9	Batu ketulis	103,70	10	0	Bakhu
10	Bandar negeri suoh	170,85	10	0	Srimulyo
11	Sumber jaya	195,38	5	1	Tugu sari
12	Way tenong	116,67	8	1	Mutar alam
13	Gedung surian	87,14	5	0	Gedung surian
14	Kebun tebu	14,58	10	0	Pura jaya
15	Air hitam	76,23	10	0	Semarang jaya
	Jumlah	2.064,40	131	5	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat 2018

Batas-batas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :⁸⁶

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) dan Kabupaten Way Kanan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Tanggamus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

⁸⁶ *Ibid.*

3. Letak Geografis Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat setelah pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2012 adalah 2.064,40 km², terdiri dari lima belas kecamatan yaitu Kecamatan Sumber Jaya, Way Tenong, Air Hitam, Kebun Tebu, Gedung Surian, Pagar Dewa, Sekincau, Belalau, Batu Ketulis, Suoh, Bandar Negeri Suoh, Batu Brak, Balik Bukit, Sukau, Lumbok Seminung. Kabupaten Lampung Barat terletak pada koordinat 04° ,51',26" – 05° ,20',22" Lintang Selatan dan 103° ,50',13" – 104° ,33',49" Bujur Timur.⁸⁷

Jarak antara Ibu Kota Kabupaten ke Daerah Kecamatan sebagai berikut :⁸⁸

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Liwa – balik bukit | : 04 km; |
| 2. Liwa – Sukau | : 16 km; |
| 3. Liwa – Lumbok Seminung | : 48 km; |
| 4. Liwa – Batu Brak | : 21 km |
| 5. Liwa – Belalau | : 28 km; |
| 6. Liwa – Bandar Negeri Suoh | : 48 km; |
| 7. Liwa – Batu Ketulis | : 32 km; |

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

8. Liwa – Suoh : 43 km;
9. Liwa – Pagar Dewa : 77 km;
10. Liwa – Sekincau : 41 km;
11. Liwa – Sumber Jaya : 67 km;
12. Liwa – Way Tenong : 58 km;
13. Liwa – Gedung Surian : 74 km;
14. Liwa – Kebun Tebu : 71 km;
15. Liwa – Air Hitam : 64 km.

4. Visi dan Misi Lampung Barat

a. Visi

“Lampung Barat sejahtera dan berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa”

Untuk memahami Visi Pembangunan tersebut diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Sejahtera: terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan kebudayaan daerah
- 2) Berdaya Saing: terwujudnya peningkatan kemampuan dan keunggulan daerah.
- 3) Iman dan Taqwa: terwujudnya masyarakat yang memiliki keshalehan hidup (taat kepada Tuhan dalam arti mengikuti

⁸⁹ Masnuri, Staf Pemda, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 1 agustus 2019

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya) serta meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama

b. Misi

Untuk itu, ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, yaitu:⁹⁰

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, harmonis, kesetaraan gender dan mengembangkan kebudayaan daerah.
- 2) Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian, kepariwisataan, inovasi teknologi, dengan fokus utama pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam serta energi baru dan terbarukan yang berwawasan lingkungan
- 3) Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan iptek, kepemudaan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan daya dukung infrastruktur, tata ruang dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan berkeadilan.

B. Sosial Budaya Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 kecamatan, 132 pekon dan 5 kelurahan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebesar 295.689 jiwa

⁹⁰ *Ibid.*

(157.088 laki-laki dan 138.601 perempuan). Ditinjau dari tingkat usianya, penduduk Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh penduduk usia muda atau produktif, yaitu berkisar antara 20 Tahun hingga 45 Tahun. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Barat masih timpang atau tidak merata antar wilayah. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kebun Tebu 1.436 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Batu Brak yaitu 49,75 jiwa/km².⁹¹

Struktur umur penduduk menggambarkan struktur penduduk berdasarkan usia balita (0-4), usia sekolah (5-19), usia produktif (20-64), dan usia lanjut diatas 65 Tahun. Berdasarkan data struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan persentase tertinggi ada pada kelompok usia 20-45 Tahun, disusul oleh kelompok usia 10-14 Tahun, sedangkan jumlah terkecil pada kelompok usia 65 Tahun ke atas. Secara lengkap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan disajikan pada Tabel di bawah ini.⁹²

Tabel: Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
1	Balik Bukit	37.873	215,64
2	Sukau	21.095	94,55
3	Lombok Seminung	6.699	299,06
4	Belalau	12.490	57,31

⁹¹ Aliyanto, *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

5	Sekincau	18.418	155,72
6	Suoh	18.202	159,1
7	Batu Brak	13.012	49,75
8	Pagar Dewa	19.926	180,83
9	Batu Ketulis	14.929	143,96
10	Bandar Negeri Suoh	27.169	106,54
11	Sumber Jaya	23.789	121,76
12	Way Tenong	33.616	288,13
13	Gedung Surian	15.458	177,39
14	Kebun Tebu	20.243	1.436,42
15	Air Hitam	12.070	158,34
	Jumlah	296.689	143,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

Ditinjau dari perkembangannya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu lima Tahun terakhir cenderung menurun. Pada Tahun 2015 lalu, penduduk Kabupaten Lampung Barat tumbuh sebesar 1,62 persen, dan terus mengalami perlambatan hingga Tahun 2018 menjadi sebesar 0,88 persen. Pengembangan sumberdaya manusia, sangat terkait erat dengan pembangunan pendidikan. Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk diharapkan akan semakin baik kualitas sumberdaya manusianya. Secara empiris diketahui bahwa, dengan semakin baik pendidikan penduduk, maka tingkat produktivitas akan semakin baik pula.

Kondisi social budaya Lampung Barat ditandai dengan adat istiadat pesisir yang masih terpelihara hingga saat ini. Lampung Barat dikenal dengan sebutan *Tanoh Sai Betik* atau tanah yang indah dengan tata kehidupan masyarakat dengan sistem Patrilineal, dimana harta pusaka, Gelar dan nama Suku diturunkan menurut garis Ayah/Bapak. Suku bangsa asli yang mendiami wilayah Kabupaten Lampung Barat berasal dari bekas Kerajaan Skala Brak yang banyak mendapat pengaruh Sumatera Barat. Masyarakat Kabupaten Lampung Barat tergabung dalam 6 (enam) Kebuayan, yaitu:⁹³

1. Buay Belunguh (Kenali)
2. Buay Pernong (Batu Brak)
3. Buay Bejalan Diway (Kembahang)
4. Buay Nyerupa (Sukau)
5. Buay Bulan (Cenggiring)
6. Buay Benyata (Luas)

C. Sarana Dan Prasarana di Lampung Barat

Dalam rangka usaha menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, maka pengembangan sistem perhubungan memegang peranan penting. Jaringan sistem transportasi di wilayah Kabupaten Lampung Barat sangat strategis terletak pada perlintasan dari beberapa Provinsi yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.⁹⁴

Di Kabupaten Lampung Barat, prasarana dan sarana transportasi hanya terbatas pada perhubungan darat berupa kendaraan roda dua dan roda

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

empat atau lebih. Secara geografis wilayah ini diuntungkan karena dilalui oleh jalan Lintas Barat Sumatera, akibatnya mobilitas penduduk, barang dan jasa dari dan kewilayah Kabupaten Lampung Barat ini cukup tinggi.

Wilayah Kabupaten Lampung Barat dilalui oleh jaringan Jalan Nasional yang menghubungkan dari arah Utara ke Selatan yaitu Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Lampung serta Pulau Jawa, sehingga aksesibilitas transportasi di wilayah ini cukup padat. Di samping jalan negara tersebut sebagai jalan arteri primer di wilayah ini, terdapat juga jaringan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan antara wilayah kabupaten dalam Provinsi Lampung maupun dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat itu sendiri.

Wilayah Kabupaten Lampung Barat terletak pada wilayah yang strategis dilalui jaringan jalan negara (*Trans Sumatera*) lintas barat. Dengan kondisi tersebut interaksi lalu-lintas di wilayah ini meliputi lalu-lintas menerus, regional dan lokal. Lalu-lintas menerus adalah pergerakan lalu-lintas angkutan barang atau penumpang yang melintasi wilayah ini tanpa melakukan bongkar muat barang atau penumpang. Rute lalu-lintas menerus ini dari Pulau Jawa - Bandar Lampung - Bukit Kemuning – Liwa – Danau Ranau/Krui - Bengkulu, dan sebaliknya.

Prasarana pendidikan umum di wilayah Kabupaten Lampung Barat meliputi fasilitas pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas

(SMA). Jumlah fasilitas pendidikan di wilayah Kabupaten Lampung Barat mulai dari TK sampai SMA, disajikan pada Tabel berikut :

Tabel: Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	94
2.	Sekolah Dasar (SD dan MI) :	
	SD Negeri	357
	MI Negeri	4
	MI Swasta	31
	Jumlah	392
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP dan MTs) :	
	SMP Negeri	30
	SMP Swasta	14
	MTs Negeri	1
	MTs Swasta	38
	Jumlah	83
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA dan SMU)	
	SMU Negeri	18
	SMU Swasta	6
	SMA Negeri	2
	SMA Swasta	12
	MAN	3
	Jumlah	41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

Prasarana dan sarana kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Barat dalam menunjang peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat hingga Tahun 2018 meliputi Rumah Sakit, Puskemas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin Dan Apotek. Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Barat sebanyak satu unit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Liwa. Puskesmas relatif sudah dijumpai di setiap kecamatan-kecamatan dengan jumlah keseluruhnya 19 unit (9 unit Perawatan dan 10 Puskesmas). Puskemas Pembantu juga terdapat di wilayah kecamatan sehingga berjumlah 56 unit.

Sarana peribadatan di Kabupaten Lampung Barat berjumlah 1.024 buah, yang terdiri dari peribadatan agama Islam, Kristen/Khatolik, dan Hindu. Jumlah prsarana peribadatan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel : Sarana Peribadatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	659
2.	Langgar / Mushola	316
3.	Gereja	18
4.	Pura	22
5.	Vihara	9
Jumlah		1.024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

Sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Barat mendapat air minum dari sungai dan sumur, sedangkan penduduk yang mendapatkan sarana air minum dari PDAM baru sebagian kecil. Meskipun pelayanan air minum yang dikelola PDAM belum merata, terutama di wilayah perdesaan namun masyarakat setempat dapat memenuhi kebutuhan air dengan cara membuat sumur dengan kedalaman 5-12 meter. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan wilayah yang mendapatkan fasilitas air minum baru terbatas pada wilayah perkotaan. Jumlah prasarana produksi air minum berjumlah 24 unit, dengan kapasitas produksi sebesar 1.395 m³ per hari.

Fasilitas telepon di suatu wilayah merupakan salah satu sarana penunjang untuk hubungan komunikasi dari suatu wilayah ke wilayah lain. Sebab hampir seluruh kota di wilayah kecamatan sudah memiliki telepon dan kantor pos yang biasa melayani masyarakat yang membutuhkan. Percepatan sistem media informasi dan komunikasi sangat berpengaruh didalam berbagai

aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial-budaya, politik dan keamanan terlebih lagi penentuan kebijakan pembangunan wilayah. Wilayah Kabupaten Lampung Barat belum seluruhnya dapat dilayani sarana telepon. Dari pengamatan yang dilakukan baik lapangan maupun sistem jaringan telpon di wilayah kabupaten, bahwa penduduk yang terlayani fasilitas telepon ini terutama kawasan-kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan perkotaan sedangkan kawasan-kawasan perdesaan belum sepenuhnya terlayani. Di era sistem informasi saat ini dan untuk menunjang perekonomian masyarakat baik wilayah perdesaan maupun perkotaan, peningkatan pelayanan sistem informasi ini sangat diharapkan pengembangannya di masa yang akan datang. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya telepon seluler, pelayanan telekomunikasi menjadi sangat terbantu dengan telah beroperasinya beberapa operator seluler yang meliputi Telkomsel, Indosat maupun Ceria.

Prasarana penting lainnya yang telah terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah listrik. Tahun 2018 prasarana listrik dilayani oleh 11 PLN cabang. Jumlah daya yang terjual di seluruh wilayah pelayanan PLN Lampung Barat adalah sebesar 2,27 juta KVA. Prasarana penunjang pariwisata berupa hotel di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 15 unit hotel. Jumlah tersebut masih terasa kurang bila dibandingkan dengan peningkatan kunjungan wisata yang semakin meningkat. Prasarana perekonomian yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari pasar, dan kompleks pertokoan (ruko). Jumlah pasar sebanyak 43 unit, dan kompleks pertokoan (ruko) 32 unit, yang terutama

tersebar di Liwa Balik Bukit, Sekincau, Sumber Jaya, dan Way Tenong. Kelembagaan perekonomian yang berperan cukup penting di Kabupaten Lampung Barat adalah koperasi dan perbankan, yang meliputi perbankan nasional dan daerah. Bank yang memiliki kantor cabang meliputi: Bank BNI, Bank BRI, Bank Lampung, dan Bank Eka, dan Bank Sewu Arta/BPR Liwa, Bank BTPN.

D. Perekonomian di Lampung Barat

Berdasarkan dari kontribusi masing-masing sektor (*lapangan usaha*) dalam pembentukan PDRB, tampak bahwa perekonomian daerah Kabupaten Lampung Barat masih didominasi oleh sektor primer, dimana sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan (*leading sector*). Tiga sub-sektor utama penyumbang PDRB Kabupaten Lampung Barat adalah sub-sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 48,90% dari PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2010-2018. Sektor kedua penyumbang terbesar PDRB adalah perdagangan besar dan eceran sebesar 12,61% dari PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2010-2018. Adapun sektor-sektor lainnya masih relatif kecil, yaitu hanya 5% atau kurang.⁹⁵

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai penduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk kabupaten lain di Provinsi Lampung. Secara umum besar pendapatan per kapita dapat digambarkan dari pembagian besaran PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian sebagai indikator ekonomi

⁹⁵ *Ibid.*

makro pendapatan per kapita suatu wilayah dapat memberi informasi awal mengenai keadaan sosial ekonomi atau kesejahteraan wilayah tersebut. Semakin tinggi angka pendapatan per kapita suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan penduduk wilayah tersebut juga semakin tinggi, sepanjang distribusi pendapatan penduduk tidak terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok.

E. Pemerintahan di Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3452); dan pada Tahun 2012 mengalami pemekaran menjadi DOB Pesisir Barat melalui Undang-undang No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 231, Tambahan Lembaran Negara RI No: 5364). Adapun Kepala Daerah Lampung Barat yang pernah menjabat sejak berdirinya pada Tahun 1991 disajikan pada tabel berikut.⁹⁶

Tabel : Urutan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 1991 sampai sekarang

No	Bupati	Wakil Bupati	Masa Jabatan
1	Letkol. Chb. Hakim Saleh Umpu Singa	-	1991 – 1997
2	Drs. Indra Ismail bangsawan	-	1997 (Penjabat)
3	Letkol. I Wayan	-	1997 – 2002

⁹⁶ Masnuri, *Ibid.*

	Dirpha		
4	Erwin Nizar T	Drs. Mukhlis Basri MM	2002 – 2007
5	Drs. Mukhlis Basri MM	Drs. Dimiyati Amin	2007 – 2012
6	Drs. Mukhlis Basri MM	Drs. H Makmur Ashari	2012 – 2017
7	Parosil Mabsus	Mad Hasnurin	2017 – 2022

Sumber : Pemda Kabupaten Lampung Barat

Anggota DPRD Lampung Barat periode 2014-2019 yang pada awalnya berjumlah 40 orang dilantik pada 18 Agustus 2018 Karena adanya pemekaran Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2012, pemilihan anggota DPRD Lampung Barat dan Pesisir Barat digabung atas nama DPRD Lampung Barat. Barulah pada tahun 2015, anggota DPRD Lampung Barat dibagi menjadi dua yaitu anggota DPRD Lampung Barat dan anggota DPRD Pesisir Barat dengan beberapa penyesuaian. Akibat penataan kembali anggota DPRD Lampung Barat tersebut, posisi Wakil Ketua II yang sebelumnya dijabat oleh Partai Gerindra harus diberikan kepada Partai Golkar, sehingga terjadi pergantian pimpinan di DPRD Lampung Barat.⁹⁷

F. Kampanye Politik 2017 di Lampung Barat

Kampanye calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat periode 2017-2022 telah dilakukan oleh masing-masing tim pemenangan calon Bupati Parosil Mabsus dan Edy Irawan Arief. Proses kampanye dilakukan secara terencana dan sistematis dengan penyampaian pesan-pesan kampanye yang berisikan sugesti dengan tujuan dapat

⁹⁷ *Ibid.*

mempengaruhi, membentuk atau membina opini publik yang ada di masyarakat. Kedua pasangan calon mempunyai beberapa kesamaan dalam perencanaan lebih memajukan Lampung Barat dari tahun-tahun sebelumnya.⁹⁸

Prioritas yang diusung oleh kedua calon Bupati Lampung Barat adalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan dengan berfokus pada pembangunan jalan poros penghubung kecamatan. Membangun Kota Liwa sebagai kota budaya, mulai dari sisi tata ruang kota, rumah adat, hingga pada konsep pembangunan ruang terbuka, alun-alun dan taman bermain. Pada sektor pendidikan juga menjadi fokus perhatian dengan akan memprioritaskan beasiswa bagi siswa berprestasi dan pembebasan biaya seragam untuk siswa yang tidak mampu.⁹⁹

Kemudian untuk sektor kesehatan, peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit tipe C, dengan fokus pada penambahan tenaga medis, perluasan jaminan kesehatan bagi masyarakat non-penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta penambahan ambulans di setiap puskesmas.¹⁰⁰ Selanjutnya bidang sosial akan meluncurkan program bedah rumah setiap tahun bagi masyarakat tidak mampu, juga menggerakkan gotong-royong masyarakat sekitar.¹⁰¹ Pada sektor pertanian akan melaksanakan peningkatan kesejahteraan petani melalui optimalisasi badan usaha milik desa melalui

⁹⁸ Lisdarto, Anggota KPU, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 1 Agustus 2019

⁹⁹ Boy Adijaya, Tim Sukses pasangan calon Nomor urut 01, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 6 agustus 2019

¹⁰⁰ Zainal Arif, Tim Sukses pasangan calon Nomor urut 01, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 7 agustus 2019

¹⁰¹ *Ibid.*

penyediaan pupuk dan pembelian produk pertanian untuk menjaga stabilitas harga utamanya kopi dan sayur-mayur. Tunjangan guru honorer, guru mengaji, dan perangkat desa, juga menjadi program yang terus disampaikan saat pertemuan dengan masyarakat.

Pasangan calon Nomor urut 01 Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin juga melakukan kampanye langsung ke rumah masyarakat (*Blusukan*) sebagaimana yang dilakukan di Pekon Fajar Agung Kecamatan Belalau. Kegiatan tersebut sekaligus memantau perkembangan bantuan *Kambing* yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat Pekon setempat. Peternakan kambing di Pekon Fajar Agung diperoleh dari bantuan pemerintah dengan sebutan bantuan *Kelompok Tani*.¹⁰² Kelompok tani dibentuk oleh aparat Desa/Pekon dengan membagi warganya menjadi beberapa kelompok. Pekon Fajar Agung mempunyai empat kelompok tani dengan masing-masing kelompok beranggotakan lebih dari dua puluh orang.¹⁰³ Menurut pasangan calon Parosil Mabsus jumlah kelompok tani di Pekon Fajar Agung masih terlalu rendah, dengan demikian bantuan kepada kelompok tani ini juga menjadi prioritas pasangan calon ini.

Selain bantuan kambing pasangan calon yang sering disapa *Pakcik* itu akan meluncurkan bantuan mesin giling kopi, karena masih minimnya masyarakat yang mempunyai mesin penggiling kopi. Dengan pengelolaan yang baik bantuan mesin ini akan sangat membantu masyarakat pada saat

¹⁰² Jusef, Warga Pekon Fajar Agung, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 5 agustus 2019

¹⁰³ Ahyan, Warga Pekon Fajar Agung, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 5 agustus 2019

panen kopi tiba. Menurut Jusep dan Ahyan (*Warga Pekon Fajar Agung*) mesin penggiling kopi sangat dibutuhkan ketika musim panen tiba. Di Pekon Fajar Agung mesin penggiling kopi masih sangat minim sehingga saat panen tiba penggiling kopi kualahan menggiling kopi para petani setempat. Selain itu pihak petani juga harus bersabar menunggu giliran kopinya untuk digiling. Dengan bantuan pemerintah melalui mesin penggiling kopi tentunya akan lebih memperlancar roda perekonomian masyarakat setempat.

Program Lampung Barat terang juga akan menjadi prioritas selanjutnya, untuk menjawab permasalahan ketersediaan listrik yang masih menjadi masalah masyarakat daerah setempat, dengan melaksanakan percepatan pengolahan potensi panas bumi untuk ketersediaan listrik di Lampung Barat.¹⁰⁴

Harapan dari kampanye ini ialah dapat membangun opini publik di masyarakat Lampung Barat. Kegiatan kampanye politik untuk membentuk opini publik atau pendapat umum masyarakat sangatlah penting karena opini publik dianggap dapat mempengaruhi masyarakat ketika melaksanakan pemilihan umum. Berbagai bentuk kampanye seperti yang dipaparkan di atas, pada momen itu sering terjadi kecurangan yang menguntungkan satu belah pihak. Kecurangan yang terjadi pada pasangan calon Parosil Mabsus yaitu ketidak netralan pejabat sebelumnya. Mukhlis Basri adalah kakak Parosil Mabsus yang lebih dahulu menjabat Bupati Lampung Barat dua periode dan wakil Bupati satu periode. Masa jabatan Mukhlis Basri sebagai Bupati

¹⁰⁴ Boy Adijaya, *Ibid*.

Lampung Barat periode ke-2 adalah 2012-2017 atau masa jabatannya belum selesai pada saat adiknya mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Barat periode 2017-2022. Sangat beruntung pasangan calon ini karena mendapat dukungan penuh dari Bupati sebelumnya. Pasangan calon ini juga sering disebut calon pertahana.

Kondisi di atas banyak masyarakat mengatakan bahwa Bupati Mukhlis Basri melakukan kampanye terselubung dengan menekan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Lampung Barat untuk memilih pasangan calon Parosil Mabsus pada saat pemilukada dilaksanakan. Kampanye yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon 01 ini sangat memprihatinkan. Bupati tersebut (Mukhlis Basri) menekan semua PNS agar memilih dukungannya atau adiknya pada saat pemungutan suara nanti. Mukhlis Basri bukan hanya menuntut pilihan PNSnya saja (Yang Bersangkutan) tetapi juga berikut keluarga dan sanak saudaranya.¹⁰⁵ Mukhlis meminta PNS agar ikut mendukung dan mencari dukungan dari kalangan non-PNS untuk memenangkan Parosil menjadi Bupati Lampung Barat.¹⁰⁶ Kondisi ini cukup membuat masyarakat resah terutama PNS karena bukan hanya sebatas meminta dukungan tetapi harus bertanggung jawab atas hasil perhitungan suara setelah pemilihan. Dimanapun tempatnya

¹⁰⁵ Hermalina, Pegawai Negeri Sipil, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 4 Agustus 2019

¹⁰⁶ Rohaini, Pegawai Negeri Sipil, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 4 Agustus 2019

(Pekon/Kelurahan) apabila dukungannya kalah dalam penghitungan suara maka PNS akan menjadi sasaran utamanya.¹⁰⁷

Ancaman itu bukan hanya sekedar ucapan tetapi menurut masyarakat memang benar adanya, tidak berselang lama setelah diselenggarakannya pemilukada, para PNS yang di tempat tinggal mereka kalah dalam perhitungan suara, semua PNS yang ada di Pekon/Kelurahan itu dimutasi atau dipindah tugaskan ketempat lain (Terpencil).¹⁰⁸ Tidak hanya dipindah tugaskan, ada juga PNS yang diberi sanksi *Nonjob* seperti yang dialami Bapak Kasmito warga Pekon Kenali Kecamatan Belalau. Kasmito sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Belalau, setelah pemilukada jabatannya tersebut dicabut dan tidak ada jabatan untuknya.¹⁰⁹

Penekanan Mukhlis Basri tidak hanya dengan PNS, tetapi juga dengan dengan aparatur Desa atau aparat Pekon. Menurut Azwan (*Peratin Pekon Serungkuk*), semua peratin berikut jajaran aparat pekon dibawahnya pernah dikumpulkan Mukhlis Basri di kediamannya yang berada di Kecamatan Kebun Tebu. Pertemuan itu berkedok silaturahmi kepada jajaran pengurus Pekon, tetapi inti pertemuan tersebut adalah meminta semua aparat Pekon agar ikut serta membantu memenangkan pasangan calon nomor urut 01. Sanksi juga dilontarkan untuk para aparat Pekon. Dalam pertemuan tersebut

¹⁰⁷ Hasrin, Pegawai Negeri Sipil, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 4 Agustus 2019

¹⁰⁸ Selamat Riyadi, Pegawai Negeri Sipil, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 4 Agustus 2019

¹⁰⁹ Kasmito, Pegawai Negeri Sipil, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 4 Agustus 2019

sempat terjadi suasana sedikit menegangkan karena kesalahpahaman yang disebabkan beberapa aparat mendokumentasikan suasana pertemuan tersebut. Mukhlis Berkata “matikan semua handphone, stop foto-foto dan merekam, Mukhlis meminta petugas keamanan (Polisi pamong Praja) menertibkan suasana tersebut, jangan main-main, setelah pilkada dilaksanakan saya masih punya jabatan, lihat yang terjadi dengan pekon masing-masing terlebih untuk pasangannya yang berstatus PNS jika kita tidak saling membantu”, lanjut Azwan.¹¹⁰ Kenyataan di atas cukup meresahkan masyarakat hususnya PNS dan aparat Pekon, apalagi aparat Pekon yang pasangannya (Suami/Istri) berstatus PNS atau sebaliknya.

Kampanye yang diusung pasangan calon nomor urut 02 Edy Irawan Arief dan Ulul Azmi Soltiansa, selain dari persamaan dengan pasangan calon nomor urut 01 dalam perencanaan lebih memajukan Kabupaten Lampung Barat dari Tahun-tahun sebelumnya, pasangan ini juga berencana akan mengembangkan Kecamatan Balik Bukit menjadi Pekotaan, menjadikan Kabupaten Lampung Barat menjadi Sarjana, akan membangun Perguruan Tinggi di Lampung Barat. Pembangunan Perguruan Tinggi di Lampung Barat sangat penting karena banyaknya remaja yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan belum ada Perguruan Tinggi di Lampung Barat itu sendiri. Sejauh ini bagi anak muda yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi harus keluar dari Daerah Lampung Barat, bagi kalangan yang mampu hal tersebut bisa saja dilakukan mengingat biaya yang

¹¹⁰ Azwan, Peratin Pekon Serungkuk, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 2 Agustus 2019

harus disiapkan tidak sedikit. Dengan pembangunan Perguruan Tinggi tentunya para anak muda Lampung Barat bisa menimba ilmu di bangku perkuliahan di Kampung halamannya sendiri, urai Edy menurut tim pemenangannya.¹¹¹

Kampanye belum usai, selain program-program unggulan di atas tetapi ada juga yang mencolok menurut masyarakat meskipun tidak menekan masyarakat seperti yang dilakukan tim sukses pasangan calon 01. Cara-cara kampanye yang dilakukan seperti penyebaran berita bohong, mengandung unsur hinaan dan lainnya.¹¹² Apabila kepala daerah tidak digantikan dengan pendaatng baru maka masyarakat Lampung Barat masih tetap seperti Tahun-tahun sebelumnya untuk kedepannya. Merasa terintervensi atau selalu dalam tekanan dan cengkraman, tidak ada pembangunan dan lain sebagainya menurut pasangan calon 02 yang biasa disebut *Edypay* itu. Dalam sebuah kampanye terbuka pasangan calon Bupati Edypay ini dipermasalahkan masyarakat. Persoalan tersebut muncul ketika Edy Irawan Arief melakukan kampanye di pekon Kenali Kecamatan Belalau, yang diduga mengandung unsur hinaan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Menurut Rustam Efendi (*Peratin Pekon Kenali*), dalam kampanye tersebut Edy Irawan mengatakan jika Sarjana Pendidikan tidak layak menduduki jabatan struktural di pemerintahan. Perkataan tersebut ditujukan kepada calon Bupati Parosil Mabsus karena Parosil adalah lulusan Sarjana

¹¹¹ Zainal arif, *Ibid.*

¹¹² Rustam Efendi, *Peratin Pekon Kenali*, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 2 agustus 2019

Pendidikan menyandang gelar (S.Pd.), menurutnya gelar tersebut lebih pantas diposisikan pada posisi yang seharusnya yaitu menjadi tenaga pengajar atau Guru. Akibat dari perkataan Edy tersebut banyak masyarakat baik dari pekon kenali sendiri maupun dari pekon lain yang mengetahuinya merasa tersinggung sehingga masyarakat melakukan demo menuntut pihak Edypay meminta maaf secara terbuka, imbuh Rustam.¹¹³

Berbeda dengan yang terjadi di Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis, menurut Aspani (*Warga Pekon Luas*), tim pemenang pasangan calon Bupati Edypay pernah tertangkap basah sedang membagi-bagikan uang sogokan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon Edypay pada saat Pemilukada. Kejadian ini tertangkap basah oleh anggota tim sukses pasangan calon Bupati Parosil Mabsus, tetapi kasus ini tidak sampai ke Bawaslu dikarenakan tadi persaudaraan dan kekerabatan, sehingga permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, menurut Aspani.¹¹⁴

Pemilihan Umum Kepala Daerah Lampung Barat Tahun 2017 diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2017-2022. Terdapat dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar pada Pilkada Serentak Tahun 2017 ini. Calon petahanan Parosil Mabsus mencalonkan diri bersama calon Wakil Bupati Mad Hasnurin dengan didukung oleh PDIP, PAN, dan, Golkar. Sementara itu, Edy Irawan Arief turut mencalonkan diri untuk menjadi Bupati dengan didampingi oleh calon Wakil Bupati Ulul Azmi Soltiansa.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Aspani, Warga Pekon Luas, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 5 Agustus 2019

Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem, PKS, PPP, PKB, Demokrat, dan Gerindra.¹¹⁵ Agar lebih jelas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 berikut Partai pengusungnya disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel : Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 serta Partai pendukung.

Nomor Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Partai Pendukung
01	H. Parosil Mabsus, S.Pd.	Drs. Mad Hasnurin	PDIP, PAN, dan Golkar
02	Dr. H. Edy Irawan Arief, S.E., M.E.	H. Ulul Azmi Soltiansa, S.H.	Partai Nasdem, PKS, PPP, PKB, Demokrat, dan Gerindra

Sumber : KPUD Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Lampung Barat Pemilukada Tahun 2017 diselenggarakan pada 533 TPS, dengan pemilih tetap yang berjumlah 210.656. Pemilih berjenis kelamin laki-laki berjumlah 110.963, sedangkan pemilih berjenis kelamin perempuan berjumlah 99.693. Pengguna hak pilih laki-laki berjumlah 86.797, sedangkan pengguna hak pilih perempuan berjumlah 76.634, dengan demikian jumlah hak pilih secara keseluruhan berjumlah 163.431. Berikut disajikan dalam bentuk Tabel jumlah pemilih dan pengguna hak pilih pada pemilukada Tahun 2017 di Lampung Barat.¹¹⁶

Tabel : Jumlah pemilih dan pengguna hak pilih Pemilukada Tahun 2017 Kabupaten Lampung Barat

	Pemilih Laki-laki	Pemilih Perempuan	Total

¹¹⁵ Lisdarto, anggota KPUD, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 1 Agustus 2019

¹¹⁶ *Ibid.*

Pemilih	110.963	99.693	210.656
Pengguna Hak Pilih	86.797	76.634	163.431
Partisipasi memilih	77,1%	75,9%	75,4%
Partisipasi tidak memilih	22,9%	24,1%	24,6%

Sumber : KPUD Kabupaten Lampung Barat

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 dimenangkan oleh pasangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin dengan perolehan suara sebesar 92.124 (57,01%), sementara pasangan Edy Irawan Arief dan Ulul Azmi Soltiansa mendapatkan perolehan suara sebesar 69.470 (42,99%). Dengan jumlah suara 161.594 dari pengguna hak pilih yang berjumlah 163.431, dan suara tidak sah berjumlah 1.837 suara.¹¹⁷ Agar Lebih jelas perolehan suara pililukada Lampung Barat tahun 2017 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel : Jumlah perolehan suara Pemilukada Tahun 2017 di Lampung Barat

Nomor Urut	Pasangan Cabup dan Cawabup	Total Suara	Persentase (%)
01	H. Parosil Mabsus, S.Pd. - Drs. Mad Hasnurin	92.124	57,01
02	Dr. H. Edy Irawan Arief, S.E., M.E. - H. Ulul Azmi Soltiansa, S.H.	69.470	42,99
	Total	161.594	100

Sumber : KPUD Kabupaten Lampung Barat

¹¹⁷ *Ibid.*

BAB IV

ANALISA DATA

A. Etika Kampanye Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Lampung Barat

Berdasarkan hasil observasi lapangan pada pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2017 yang lalu, secara keseluruhan dalam pelaksanaan proses pemilihannya memang sudah mengikuti pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilu dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini bisa dilihat dari lancarnya proses pemilihan Kepala Daerah tersebut dimulai dari pembentukan panitia sampai pemungutan suara tanpa ada pelanggaran yang berarti.¹¹⁸

Walaupun terdapat dinamika sosial yang berimbas konflik sosial tetapi pelaksanaan Pilkada masih berjalan dengan baik. Karena dalam pemerintahan yang Demokratis melibatkan seluruh masyarakat dan menempatkan kedudukan setiap orang dalam politik sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi secara langsung ataupun melalui perwakilan yang mereka pilih dalam menentukan undang-undang ataupun dalam memilih Kepala Daerah. Apabila akhlak, dan etika benar-benar ditinggalkan maka Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

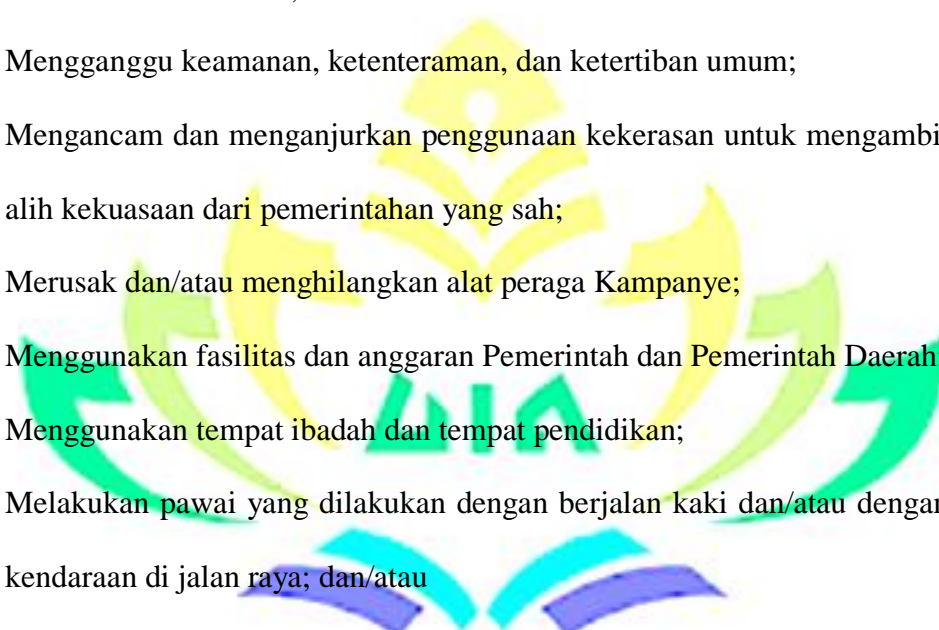
Pemilukada Tahun 2017 di Lampung Barat telah usai, begitu juga dengan Kampanye telah dilakukan dengan metode bermacam-macam seperti

¹¹⁸ *Ibid.*

tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye, blusukan, dan lain-lain. Melalui kampanye, suatu partai atau pasangan kontestan dapat memperkenalkan program, visi-misi, dan citra dirinya serta partainya sekaligus dapat menarik simpati pemilih agar memberikan hak suara dan dukungan mereka kepada partai atau calon tertentu. Pada momen ini sering terjadi ketegangan-ketegangan bahkan sampai terjadi kericuhan pada masyarakat. Tetapi menurut informasi dari anggota KPUD Kabupaten Lampung Barat selama kampanye berlangsung tidak ada pelanggaran yang berarti, meskipun ada kericuhan-kericuhan di tengah masyarakat tetapi tidak ada laporan dari masyarakat mengenai permasalahannya kepada pihak terkait.

Kampanye politik menjelang pilkada Tahun 2017 berjalan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku. Lisdarto menjelaskan Salah satu peraturan KPUD tersebut yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 pasal 66 ayat (1) tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota. Dalam Kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;

- 
- c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bentuk-bentuk kampanye yang digunakan sebagai alat untuk merekrut suara adalah blusukan, pertemuan terbatas, tatap muka dan berdialog, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, dan rapat umum, tegas informan. Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati beradu ketat dalam program-program pembangunan Kabupaten Lampung Barat lima Tahun mendatang. Seperti kampanye yang dilakukan pasangan calon Nomor urut 01 yaitu blusukan ke Desa-desa terpencil untuk melihat langsung kondisi masyarakatnya yang jauh

dari pusat perkotaan. Sedangkan kampanye pasangan calon Nomor urut 02 lebih kepada pertemuan-pertemuan yang diadakan secara terencana.¹¹⁹

Bentuk kampanye yang lain yang dilakukan tim kampanye masing-masing pasangan calon seperti menghasut, memfitnah, maupun mempermasalahkan suatu golongan tertentu sempat beredar isu-isu ditengah masyarakat. Namun pihak masyarakat juga tidak ada yang melaporkan permasalahan tersebut ke pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib juga sempat turun langsung ke tengah-tengah masyarakat guna memastikan kebenaran isu-isu yang beredar tersebut. Tetapi pihak berwajib tidak mendapatkan hasil karena sulitnya masyarakat membuktikan isu-isu yang beredar tersebut. KPU Kabupaten Lampung Barat berkesimpulan bahwa Kampanye Politik pada Pemiluakda Tahun 2017 di Lampung Barat berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.¹²⁰

B. Pandangan Politik Islam Tentang Etika Kampanye Politik Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 Di Lampung Barat

Pemilihan Umum Kepala Daerah di Lampung Barat telah diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2017-2022. Pemiluakda ini dimenangkan oleh pasangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin dengan perolehan suara 92.124 (57,01%). Sementara pasangan kedua Edy Irawan Arief dan Ulul Azmi Soltiansa mendapatkan perolehan suara 69.470 (42,99%).

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

Kampanye pun telah dilakukan dengan metode bermacam-macam seperti blusukan, pertemuan terbatas, tatap muka dan berdialog, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, dan rapat umum. Melalui kampanye, suatu partai atau pasangan kontestan dapat memperkenalkan program, visi-misi, dan citra dirinya serta partainya sekaligus dapat menarik simpati pemilih agar memberikan hak suara dan dukungan mereka kepada partai atau calon tertentu. Bentuk dan tujuan kampanye sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tugas dakwah, oleh karena itu pelaksanaan kampanye perlu diatur agar sesuai dengan etika Islam dan tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan syariat Islam.

Konsep kampanye calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat periode 2017-2022 telah dilakukan oleh tim pemenang masing-masing calon Bupati Parosil Mabsus dan Edy Irawan Arief. Proses kampanye dilakukan secara terencana dan sistematis dengan penyampaian pesan-pesan kampanye yang berisikan sugesti dengan tujuan dapat mempengaruhi, membentuk atau membina opini publik yang ada di masyarakat.

Pertama kampanye politik di Lampung Barat yang dilakukan kedua pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati adalah dengan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dengan menyampaikan program visi dan misi untuk mensejahterakan rakyat lima Tahun mendatang. Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Nabi Yusuf AS dalam QS Yusuf ayat 55 yang artinya:

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi be"pengetahuan".

Berdasarkan ayat di atas, merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan). Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Seseorang yang di dalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.

Kedua kampanye dengan cara tatap muka untuk berdialog dan tanya jawab dengan masyarakat agar mengetahui permasalahan yang dialaminya, dengan demikian bisa diberikan solusi untuk permasalahan masyarakat tersebut. Kampanye dengan cara ini sejalan dengan Al-Nahlawi yang menyatakan bahwa dialog adalah percakapan dua orang atau lebih, melalui tanya jawab, mengenai satu tema atau tujuan. Mereka berdiskusi tentang permasalahan tertentu, kadang diperoleh hasil, kadang satu sama lain tidak puas. Namun pendengar tetap mendapatkan pelajaran.

Dialog dalam Alqur'an dikenal dengan nama hiwar yaitu percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai suatu topik yang mengarah pada suatu tujuan. Kampanye dengan berdialog dapat berlangsung secara dinamis karena kedua pihak terlibat langsung dalam

pembicaraan baik itu tanya jawab maupun diskusi, sehingga masalah yang ada di Kabupaten Lampung Barat dapat dipahami oleh Calon Bupati dan dapat ditemukan solusinya.

Ketiga kampanye dengan cara turun langsung ke rumah masyarakat atau blusukan, untuk memastikan keadaan maupun keluhan masyarakat di tempat-tempat tertentu. Gaya kampanye blusukan ini populer disaat Presiden Joko Widodo memulainya pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Tahun 2014 yang lalu. Namun ditinjau dari segi fiqh siyasah sebenarnya jauh sebelum Bapak Jokowi melakukan blusukan sudah ada pemimpin Islam yaitu Umar bin Khattab melakukan blusukan.

Umar bin Khattab yang dikenal sebagai pemimpin yang adil pada waktu itu blusukan memantau dan mencari mana rakyatnya yang kelaparan dan tidak makan. Di depan pintu rumah warga Umar bin Khattab mendengar tangisan gadis kecil yang kelaparan, sementara seorang ibu dari gadis kecil itu di dapur sedang membalik-balikan sesuatu yang ada di dalam panci. Umar bin Khattab berkata: “Apa yang anda masak wahai ibu?” Lihatlah sendiri! Jawab ibu itu. Ketika Umar bin Khattab melihatnya ternyata ibu itu sedang memasak batu untuk Anaknya hendak berbuka puasa. Umar bin Khattab menagis, air matanya terus mengalir, sementara ibu dari anak itu tidak tahu kalau yang ada di depan matanya adalah Amirul Mukminin. Ibu itu terus memaki-maki Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Umar bin Khattab terus menangis, Ia kemudian pulang ke Madinah,

dan malam itu juga ia memanggul gandum dengan pundaknya sendiri dalam perjalanan yang cukup jauh.

Umar bin Khattab sangat khawatir kalau karena hal itu ia dimasukkan ke dalam neraka. Duhai *Al-Faruq* betapa mulianya Akhlakmu, seorang khalifah Islam yang blusukan setiap malam untuk memastikan keadaan rakyatnya. Sekilas kisah di atas hanya sekedar ingin menggambarkan tentang tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Namun jika dipahami lebih dalam kita akan mendapatkan bahwa kisah di atas selain mengandung kewajiban seorang pemimpin untuk memperhatikan keadaan bawahannya atau orang yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat pesan pula kepada seluruh orang beriman untuk memperhatikan antara satu sama lain.

Keempat kampanye dengan cara meminta secara paksa, menekan, berbuat curang, hingga mengancam atau mengintimidasi. Kampanye dengan cara ini tentu sangat bertentangan dengan etika politik Islam, karena pengancaman dan penekanan merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji. Dalam Al-Qur'an Allah SWT melarang untuk melakukan tindakan yang tidak adil tersebut dalam QS. Al-Maa'idah ayat 8 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Penjelasan lain dalam etika kampanye politik Islam yaitu *Tarbawy* (Edukatif). Komitmen dengan nilai-nilai edukatif, persuasif dan tidak

memaksa atau mengancam/mengintimidasi, tertib dan tidak mengganggu, dan menghindari acara yang kurang bermoral. Kampanye adalah salah satu sarana pendidikan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan, di samping sebagai sarana da'wah yang memiliki makna mengajak dengan cara persuasif, tidak memaksa atau mengintimidasi. Dalam kampanye tidak boleh memaksa dan memaksakan kehendak kepada orang lain. Termasuk mempengaruhi dan mempolitisir supaya menerima dan memberikan hak pilihnya kepada partai atau pasangan calon tertentu dengan berbagai cara yang bersifat memaksa atau terpaksa, seperti dengan cara politik uang. Dengan demikian, kampanye edukatif ini menuntut setiap partai dan juru kampanye/da'i agar lebih inovatif, kreatif, dan proaktif. Massa atau pemilih mempunyai hak dan kebebasan memilih suatu partai atau pasangan calon sesuai dengan pilihan hati nurani. Sebagaimana dalam memeluk agama, manusia diberikan hak untuk beragama sesuai keyakinannya, apalagi dalam hal berpartai, seperti firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 256 yang artinya :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Kelima kampanye dengan cara menyebarkan berita tidak benar dan mencari-cari kesalahan atau keburukan pihak lawan demi kepentingan satu belah pihak. Dengan cara ini juga tentunya bertentangan dengan syari'at Islam karena pemberitaan yang tidak benar adalah fitnah. Kampanye dengan menyebar berita bohong merupakan Akhlaqul Madzmumah atau sifat yang tercela yang harus di jauhi, hal ini disebut dan termasuk ke dalam perbuatan

fitnah. Perbuatan fitnah adalah menyebarkan kabar tidak benar/menyiarkan rahasia (aib) seseorang kepada orang lain padahal orang itu tidak pernah melakukannya. Al-Qur'an melarang perbuatan yang dapat merugikan orang lain, yang berkaitan dengan larangan berburuk sangka dan menggunjing terdapat dalam surah Al- Hujurat ayat 6 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Kritik dan koreksi yang kita sampaikan kepada seseorang kalau tidak hati-hati lebih memperlihatkan kedengkian kita. Perkataan yang baik adalah pembuktian kemusliman seseorang. Hendaknya setiap orang memastikan bahwa kata-kata yang akan diucapkannya benar-benar baik. Apabila kita tidak yakin akan dapat mengeluarkan kata-kata yang baik, diam itu lebih baik. Berkata yang baik tentunya akan lebih bermanfaat dibandingkan diam. Akan tetapi, menghindari akibat dari perkataan yang kurang baik akan lebih utama dibandingkan kita memaksakan berbicara yang akan berakibat buruk kepada diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan menjelek-jelekan orang lain bertolak dengan kebenaran dalam Islam dosanya lebih besar dari pada membunuh. Fitnah adalah bentuk komunikasi kepada satu pihak atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma atau pemikiran negatif pada sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain. Fitnah didasarkan pada fakta palsu yang dipengaruhi oleh sifat penghormatan, buruk sangka, obsesi, atau menjatuhkan atau menaikkan nilai reputasi seseorang atau sesuatu pihak.

Ada banyak media yang digunakan untuk menyebar kabar palsu atau fitnah kepada sesuatu pihak. Fitnah bisa dilakukan melalui metode suara atau berbisik antara seseorang atau seseorang yang lain. Menggunakan media komunikasi modern seperti menggunakan media massa baik melalui berita, koran, radio, televisi, internet dan lain-lain. Fitnah juga bisa dikembangkan antara satu pihak bertentangan dengan pihak lain dengan hanya menjanjikan sesuatu dengan upah kepada pihak yang terlibat fitnah.

Pemilukada tentunya ada tindakan kampanye yang digunakan sebagai upaya untuk memperkenalkan calon atau kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat sesuai nuraninya. Kampanye bersangkut paut dengan perilaku yang cukup dilembagakan. Oleh karena itu dampak atau perubahan besar secara intrinsik seringkali terbatas dan media dimanfaatkan untuk membantu kekuatan lembaga lainnya. Telah dilaksanakan dalam lingkungan seperti itu dan secara relatif sedikit banyaknya sudah mengetahui hal ikhwal kampanye, untuk mempromosikan tujuan yang tidak biasa atau baru. Kampanye yang ideal adalah ajakan memilih kepada pemilih dengan menekankan penyampaian visi, misi, dan program. Penyampaian visi, misi, dan program ini dapat saja berupa kampanye positif atau negative. Tetapi masyarakat tentunya berharap dengan kampanye positif sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku.

Bangsa ini harus perihatin karena memang semakin jelas ada oknum-oknum yang ingin merusak Demokrasi yang dibangun. Pemilu yang demokratis yang kita harapkan bersama-sama mulai dicerai oleh perbuatan-

perbutan yang melanggar etika terutama kampanye-kampanye hitam yang dialamatkan kepada kubu yang memfitnah. Hukuman atau denda terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur sejumlah larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim sukses dalam berkampanye, sedangkan ketentuan pidana pemilu tertera dalam pasal 488 tentang larangan-larangan pemilu.

Ada oknum yang melakukan pelanggaran tidak dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku karena dalam media masa yang bersifat social global sulit mendeteksi oknum yang melakukan pelanggaran, serta adanya beking atau perlindungan dari penegak hukum itu sendiri yang telah terpengaruh oleh niat jahat oknum tersebut, sehingga dari pihak penegak hukum yang benar-benar untuk menegakkan hukuman kesulitan mendeteksi dan mencari tau pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum tertentu. Pelanggaran kampanye pada Pilkada Lampung Barat yaitu menekan masyarakat dan mencari keburukan pihak lawan atau memfitnah. Masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berusaha meraih suatu jabatan dari Rakyat dengan cara melanggar undang-undang maupun syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah Etika kampanye pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Lampung Barat, maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Kampanye Politik yang dilakukan oleh kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati belum sepenuhnya berjalan dengan baik di mata masyarakat Lampung Barat. Adanya suatu penekanan dengan masyarakat khususnya kepada Pegawai Negeri Sipil serta isu-isu negatif menjadi catatan buruk bagi masyarakat. Adapun yang menjadi pemeran utama dalam penekan masyarakat untuk memihak ke salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati atau Kepala Daerah yang masih menjabat saat itu. Kampanye dengan cara blusukan hanyalah sebuah intrik dan siasat semata yang tujuannya untuk mencari simpatik dari masyarakat semata. Sedangkan isu-isu negatif dari paslon lain dilakukan oleh tim pemenangan bahkan dilakukan oleh calon Bupati itu sendiri.
2. Pandangan Islam tentang Etika Kampanye Politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Lampung Barat sebagaimana yang telah diuraikan sangat bertentangan dengan Syariat Islam seperti yang terkandung dalam surat Al-hujuraat ayat 12 menjelaskan tentang larangan berburuk sangka dan

mencari keburukan orang lain, dosanya sama seperti memakan bangkai, dan memakan bangkai dalam Islam hukumnya haram.

B. SARAN

Demi kemajuan daerah lampung barat dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada calon pemimpin dalam berkampanye harus menjunjung tinggi etika politik santun dan sesuai dengan adat-istiadat Lampung Barat, demi kepercayaan masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara sukarela dan percaya diri pada saat pemungutan suara atau pemilihan umum.
2. Hendaknya Etika Politik dalam Islam dapat dijadikan rujukan untuk kampanye dan dalam menentukan pemimpin Daerah pada Pilkada serentak di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta : Sumbangsih, 1975.

Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami* Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Arsyat Soeratmo, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* Yogyakarta : UPP STIM KPN, 2008.

Ayi Sofyan, *Etika Politik*, Bandung, Pustaka Setia : 2012.

Azumardi Azra, Dkk, *Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi*, Jakarta : Departemen Agama 2002.

Badri Yatim *Sejarah Peradaban Islam (Disarah Islamiyah II)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2003

Boy ZTF, Pranada, *Filsafat : Sejarah Aliran Dan Tokoh*, Malang : UMM Press, 2003.

Cangara Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan penyelenggaraan penterjemah Al-Qur'an, 2002

Eko Prasajo, Dkk, *Desentralisasi & Pemerintahan daerah : Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, 2006.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM, 1985

Hamzah Ya'kub, *Etika Pembangunan Ahklakulkarimah Suatu Pengantar*, Bandung: CV Diponogoro, 1981.

Hasbullah Bakri, *Sistematika Filsafat*, Wijaya, Jakarta : 1981.

Irfan Iris, *Islam dan Konstitusionalisme Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia Modern*, Pukap Indonesia, Yogyakarta : 2009

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Kansil, *Pengantatar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 1997.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung : Mandar Maju, 1996

Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981

Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 1997.

M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, Tranmisi Media Jakarta, Jakarta : 2012.

Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Logos 1999

Muhammad Abu Zahra, *Ushul fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Muhammad Fauzi Nasution, *Etika Kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih Siyasah*, Skripsi UIN SU, Medan : 2015.

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah-konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Mukhtar Sarman, *Pilkada Serentak : Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*, Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2015

P. Joko, Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT, Rineka Cipta 2004.

Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Modern English Press, 1999

Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 2001.

Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah*, Pusraka Sinar Jaya, 2001.

Suharsimi Arikunto, prosedur *Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Suhwardi K, Lubis, *Etika Propesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafik : 2000.

Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilu Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta. 1998.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, pasal 1 ayat 4.

Jurnal

Ahmad Syafi'i, *Kajian Hukum Islam Tentang Kampanye Politik Sebagai Pembelajaran Akhlak* Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya, Jurnal Ilmiah

Wawancara

Ahyan, Warga Pekon Fajar Agung, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 5 agustus 2019

Ali Rohman, Tokoh Adat, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 1 Agustus 2019

Aliyanto, Staf Badan Pusat Statistik, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 1 Agustus 2019

Aspani, Warga Pekon Luas, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 5 Agustus 2019

Azwan, Peratin Pekon Serungkuk, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 2 agustus 2019

Boy Adijaya, Tim Sukses pasangan calon Nomor urut 01, wawancara dengan penulis, Lampung

Hasrin, Pegawai Negeri Sipil, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 4 agustus 2019

Hermalina, Pegawai Negeri Sipil, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 4 agustus 2019

Jusef, Warga Pekon Fajar Agung, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 5 agustus 2019

Kasmito, Pegawai Negeri Sipil, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 4 agustus 2019

Lisdarto, Anggota KPU, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 1 Agustus 2019

Masnuri, Staf Pemda, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 1 agustus 2019

Rohaini, Pegawai Negeri Sipil, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 4 agustus 2019

Rustam Efendi, Peratin Pekon Kenali, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 2 agustus 2019

Selamat Riyadi, Pegawai Negeri Sipil, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 4 agustus 2019

Zainal Arif, Tim Sukses pasangan calon Nomor urut 01, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 7 agustus 2019

Sumber on-line

<http://catat-kan.blogspot.com/2012/10/manfaat-etika-politik.html?m=1>

<http://catat-kan.blogspot.com/2012/10/lima-prinsip-dasar-etika-politik.html?=1>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-komisi-pemilihan-umum/>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pilkada-serentak/>

<http://www.Syariahonline.com>